

BRAFOPMK

BERITA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LEKSIKON

KAA
PERTAMA
KALI DI
BULAN
APRIL

Komitmen Pemerintah Meningkatkan Anggaran Penelitian

Peringkat daya saing Indonesia dipercaya bisa terus meningkat dan menjadi lebih tinggi jika didukung oleh penelitian, teknologi serta inovasi yang kuat. Atas dasar itu pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran penelitian.



**MENIKMATI
SENSASI
JERAM DI
*Citarik***

12

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**BONUS DEMOGRAFI
HARUS BERKUALITAS**

20

IPEK

**MENANAM KENTANG
DI UDARA**

36

EKONOMI

**WEF-EA: INDONESIA
UNJUK GIGI**



SURAT PEMBACA

BUTUH KESADARAN DAN TEPAT SASARAN

Pemberian dana kompensasi bagi warga miskin yang dilakukan pemerintah sebenarnya bukan kebijakan baru. Namun saat tiba waktu realisasinya, timbul kekhawatiran dari masyarakat akan terjadi dana kompensasi itu tidak tepat sasaran. Ini jika berkaca

dari pengalaman pemberian dana kompensasi mulai dari Program Bantuan Langsung Tunai, hingga Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Kekhawatiran tersebut tentu sangat beralasan sebab penerima dana PSKS masih mengacu data lama tahun 2011 dan belum pernah dilakukan pendataan ulang. Kondisi ini tentu membuka peluang untuk salah sasaran sebab dengan rentan waktu yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan dalam sisi perekonomian masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih perhatian terhadap keakuratan data. Validasi data yang ada juga seharusnya dipermudah sistemnya agar sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat yang sudah mentas dari kemiskinan seharusnya juga memiliki kesadaran yang tinggi bahwa dana kompensasi yang ada

bukan hak dirinya lagi. Sehingga dana yang diterima bisa langsung diserahkan ke kelurahan/desa sehingga bisa disalurkan ke orang yang tepat. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari orang miskin yang merasa haknya diabaikan. Dan, pada akhirnya kondisi masyarakat akan jauh dari konflik sosial yang disebabkan adanya dana kompensasi tersebut.

Novy Haryani
Tambora, Jakarta Barat



Redaksi BRAFO PMK menerima kiriman naskah atau artikel terkait pendidikan, pembangunan daerah dibidang kesehatan dan kesejahteraan. Naskah bisa dikirim dalam bentuk ms.word ke: brafopmk@kemenkopmk.go.id.

DAFTAR ISI

EDITORIAL	3
FOKUS UTAMA	
KOMITMEN PEMERINTAH	
MENINGKATKAN ANGGARAN	
PENELITIAN	4
AJAKAN KEMBALI KE TANAH AIR	
UNTUK PARA PENELITI	6
PERKUAT JAMU, JAGA BUDAYA	8
UPAYA PREFENTIF PENTING	
DALAM HADAPI FLU BURUNG	10
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12
KESEHATAN	14
PUSTAKA	16
PENDIDIKAN	18
IPTEK	20
OPINI	22
SUARA DAERAH	24
BUDAYA	26
WISATA	29
PRODUK HUKUM	32
EKONOMI	36

INTERNASIONAL	38
PEREMPUAN & ANAK	40
REFORMASI BIROKRASI	42
UMKM	44
LINGKUNGAN	46
LEKSIKON	48
BERITA FOTO	50



Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menghadiri Hari Perempuan Internasional di Theater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini juga dihadiri Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden Perempuan Pertama di Indonesia dan sejumlah menteri perempuan dalam Kabinet Kerja seperti Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Brafo PMK diterbitkan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pembina:

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia

Pengarah:

Para Deputy Menko PMK
Para Staf Ahli Menko PMK

Penanggung Jawab:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
PMK Republik Indonesia

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Kepala Biro Informasi dan Persidangan

Redaktur Pelaksana:

Kabag Humas dan Dokumentasi
Ponco Suharyanto, S.Sos

Staf Redaksi:

M. Shokhiyan, S.S
Siti Badriah, S.S

Ahli Tata Letak/Produksi:

Kristian Suryatna, A.Md. Graf

Sirkulasi:

Abdul Kohar

Sekretaris:

Nurseha Saputra, A.Md

Sekretariat Redaksi:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id

Penerbit:

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Redaksi menerima artikel
atau tulisan juga foto.

Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang
tidak mengubah isi dan maknanya.

PENELITIAN DAN KEMAJUAN NEGARA

Bung Karno bisa jadi satu-satunya pemimpin yang serius dan konsisten memperlakukan rakyatnya sebagai asset utama dengan memajukan kualitasnya melalui pendidikan. Bagaimana tidak, ketika itu dimasa republik terbelah muda usia, si Bung telah mengirimkan ratusan pelajar ke negara-negara Uni Soviet walau belum sempat dinikmati betul hasilnya akibat gejolak politik ketika itu. Sayang, hingga hari ini kita belum melihat pemimpin yang dengan serius dan konsisten seperti si Bung dalam upayanya memperlakukan rakyatnya sebagai asset utama dengan memajukan kualitasnya lewat pendidikan.

Sebagai gambaran, pemerintahan yang lalu hanya menganggarkan untuk pengembangan penelitian dan teknologi sebesar 0,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Beberapa Negara tetangga yang PDB nya di bawah Indonesia, mengalokasikan anggaran untuk penelitian sebesar 1 persen dari Produk Domestik Bruto. Minimnya porsi alokasi anggaran untuk penelitian diduga menjadi alasan rendahnya jumlah peneliti di Indonesia. Saat ini misalnya, jumlah peneliti Indonesia yang terdaftar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebanyak 8.000 orang dan 16.000 peneliti bekerja di perguruan tinggi.

Jumlah itu tentu tak sebanding dengan penduduk Indonesia yang hampir 240 juta jiwa. Untuk mencapai angka ideal, Indonesia butuh 200 ribu peneliti di berbagai



bidang untuk bisa mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi dari negara lain. Sebagai contoh, Belarusia sebuah negara kecil di Eropa saja mempunyai 36 peneliti per 10 ribu penduduk. Adapun Jepang memberikan anggaran kepada peneliti sebanyak \$130 miliar per tahun. Maka jangan heran juga jika negeri Sakura ini sudah memenangkan 13 Nobel dunia untuk hasil penelitiannya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini ilmu pengetahuan menjadi tulang punggung negara maju untuk memenangkan persaingan. Baik ekonomi maupun politik. Mereka begitu menyadari peran penelitian ilmu pengetahuan dalam mengembangkan daya saing industri untuk pertumbuhan ekonominya. Tahun lalu produk domestik bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat 15 besar. Bahkan diprediksi 25 tahun lagi Indonesia masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi itu diharapkan diikuti dengan perhatian yang besar terhadap penelitian dan inovasi.

Komitmen Pemerintah Meningkatkan Anggaran Penelitian

Peringkat daya saing Indonesia dipercaya bisa terus meningkat dan menjadi lebih tinggi jika didukung oleh penelitian, teknologi serta inovasi yang kuat. Atas dasar itu pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran penelitian.



Di depan para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membeberkan laporan

World Economic Forum dimana disebutkan Indeks Kompetitif Global Indonesia pada 2014/2015 berada di peringkat ke-34, naik dibandingkan tahun 2013/2014 yang di peringkat 38. Walau begitu, dari 12 pilar Indeks Kompetitif Global, Indonesia

masih harus memacu empat pilar yang masih tertinggal, yaitu infrastruktur, kesiapan teknologi, pendidikan tinggi dan training, dan inovasi.

"Peringkat daya saing Indonesia akan terus meningkat secara

berkelanjutan dan semakin tinggi apabila didukung oleh penelitian, teknologi, dan inovasi yang kuat. LIPI merupakan salah satu tumpuan dalam mengatasi kelemahan Indeks Kompetitif Global Indonesia,” katanya dalam Pembukaan Rapat Kerja LIPI, di Gedung LIPI, Jakarta, awal Maret lalu. Untuk menjadi negara besar dengan penelitian dan inovasi yang kuat, menurutnya, Indonesia memerlukan dukungan sumber daya penelitian yang kuat. Di bidang SDM, jumlah peneliti dan perekayasa Indonesia masih sangat minim dibandingkan negara-negara maju.

Menko PMK menyadari bahwa permasalahan klasik yang dihadapi lembaga penelitian di Indonesia ialah terkait keterbatasan dana. “Akselerasi perkembangan riset dan teknologi di Indonesia tidak sepesat di negara-negara maju yang mendapatkan kucuran dana yang tinggi,” sebutnya. Dijelaskannya, persentase anggaran untuk kegiatan riset sejauh ini masih didominasi anggaran pemerintah, yaitu 81,1 persen, sedangkan swasta 14,3 persen dan perguruan tinggi 4,6 persen. Secara keseluruhan, anggaran riset di Indonesia hanya berkisar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal menurut rekomendasi United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), rasio anggaran iptek yang memadai adalah sebesar dua persen dari PDB.

Karenanya pemerintah berkomitmen untuk menaikkan anggaran penelitian dan pengembangan inovasi. “Hal ini menjadi suatu kesempatan untuk meningkatkan performa dan produktivitas karya riset, sehingga implikasi teknologi bagi masyarakat pada lima tahun ke depan harus

dapat diandalkan,” tandasnya.

Puan juga mengajak swasta untuk membelanjakan lebih besar lagi dalam kegiatan riset dan inovasi.

Sebagai informasi, persentase pihak swasta mau ikut serta dalam penelitian hanya sebesar 14 persen.



Minimnya keterlibatan swasta dalam penelitian disebabkan banyak hal. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Iskandar Zulkarnaen menerangkan, mindset swasta cenderung profit oriented. “Swasta itu akan melakukan sesuatu kalau itu akan memberikan keuntungan. Sementara riset itu ada investasi yang perlu tidak langsung dapat,” ungkapnya. Disamping itu, tidak adanya penghargaan yang diperoleh menjadi kendala lain dalam mengandeng swasta. Iskandar tak menampik jika selama ini pemerintah kesulitan mengandeng pihak swasta terkait keikutsertaannya dalam penelitian.

Kalaupun ada pihak swasta yang terlibat penelitian hal itu lebih didasarkan idealisme sebagai warga negara. Pihak swasta tersebut diyakini mempunyai keinginan untuk mewujudkan ilmu dan teknologi di Indonesia sehingga bukan

motif keuntungan semata yang dikedepankan. Disarankannya agar pemerintah memberikan insentif kepada pihak swasta sebagai satu solusi agar perusahaan swasta mau terlibat. “Apakah itu keringanan pajak atau apapun bentuknya insentif. Lalu kemudian diberikan kebijakan disinsentif kepada yang tidak mau. Nah, itu akan bisa bergerak bekerjasama dari swasta untuk penelitian,” tuturnya.

LIPI sendiri sebenarnya telah banyak melakukan berbagai penelitian. Sayangnya, dari sekian banyak riset itu sangat sedikit diantaranya yang aplikatif. Hal tersebut dikarenakan rendahnya alokasi dana APBN untuk riset di pemerintahan sebelumnya. Sebagai gambaran, anggaran nasional Indonesia untuk riset dan penelitian ketika itu 0,08 persen jika dibandingkan negara lain seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan yang sudah di atas 1 persen. Dana tersebut tentu tidak cukup untuk melakukan penelitian yang mendalam. LIPI sebagai lembaga sangat percaya jika ingin menjadi negara maju maka alokasi dana untuk lembaga-lembaga riset harus ditingkatkan.

Peningkatan anggaran riset dan penelitian pun sudah pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo pada tahun lalu dimana disampaikan bahwa penelitian adalah sebuah hal yang penting bagi kemajuan Indonesia. Ia berjanji akan membuat bidang penelitian Indonesia menjadi lebih baik dalam pemerintahannya pada masa mendatang. “Tidak ada negara mana pun yang maju tanpa sebuah lembaga penelitian yang baik, yang punya kemampuan, baik di bidang teknologi, nuklir, pangan, energi, dan otomotif. Semuanya bermula dari hasil riset yang baik,” ucapnya ketika itu di LIPI. **PS/ dbs**



Ajakan Kembali ke Tanah Air untuk Para Peneliti

Kisah para peneliti yang bekerja di luar negeri sudah lama terdengar. Penghargaan, gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya di luar negeri yang membuat mereka eksodus meninggalkan Indonesia. Pemerintah berencana memanggil para peneliti tersebut untuk berkontribusi kepada bangsa. Tentu dengan memberikan apresiasi sama seperti yang mereka dapat di luar negeri.

Indria Samego, Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan banyaknya peneliti Indonesia yang bertahan di luar negeri. Menurutnya, banyaknya hasil penelitian di Indonesia yang tidak dihargai, minimnya kesejahteraan membuat

mereka enggan kembali ke tanah air. Dikatakannya, bagi peneliti itu, yang paling penting adanya penghargaan dan pemanfaatan hasil penelitiannya. "Jika di luar negeri, peneliti itu sangat dihargai," katanya.

Disamping itu, kesejahteraan peneliti pun belum menjadi hal yang utama di negeri ini. Disebutkan

Indria, banyak peneliti yang telah bergelar profesor tidak memiliki ruangan kerja sendiri. Hanya peneliti yang memiliki jabatan struktural di sebuah kementerian atau lembaga yang memperoleh fasilitas serta tunjangan yang memadai. "Kalau di struktural itu gajinya mungkin standar juga, tetapi mereka dapat

tunjangan, fasilitas seperti mobil dan ruangan kerja sendiri. Padahal, peneliti-peneliti yang jabatannya profesor pun banyak yang enggak duduk di jabatan struktural,” ujarnya. Padahal, sebut Indria, jika para peneliti dikumpulkan akan membawa kemajuan besar bagi Indonesia.

Senada dengannya, peneliti LIPI lainnya, Riefqi Muna, menyayangkan kecilnya gaji peneliti di Indonesia. Alasan gaji kecil inilah yang membuat banyak peneliti hebat memilih berkariir di luar negeri karena merasa lebih dihargai. “Peneliti di LIPI gajinya tidak lebih baik dari satpol PP. Satpol PP dapat gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta per bulan. Peneliti cuma Rp 6 juta. Mereka sudah kuliah, belajar, dan mengembangkan ilmu. Kondisi ini yang membuat mereka memilih kabur ke luar negeri,” cetusnya. Di luar negeri, para peneliti itu, ungkapnya, memperoleh tawaran Rp 50 juta – Rp 70 juta sebulan.

Fenomena ini dipaparkan peneliti dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Dr Aji Sofyan Effendi, merupakan sebuah hal yang wajar. Dicontohkannya saat ia akan melakukan penelitian yang melibatkan LIPI dan instansi pemerintah. Dalam penelitian itu, Aji mengaku hanya mendapat anggaran sebesar Rp100 juta dengan kriteria yang cukup ketat dan persyaratan yang kurang transparan. “Ini berbeda dengan Toyota, salah satu perusahaan asing itu mengeluarkan anggaran “unlimited” atau tidak terbatas untuk penelitian yang ditujukan kepadanya. Dan ini hanyalah salah satu contohnya,” ucapnya.

Pemerintah sendiri tak menutup mata akan fenomena banyaknya peneliti Indonesia yang justru bekerja

di luar negeri. Dalam Rapat Kerja LIPI 2015 awal Maret lalu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa pemerintah berencana memanggil para peneliti Indonesia yang ada di luar negeri. “Kita akan tarik peneliti kita di luar negeri. Ini juga kita selesaikan dalam artian mereka ke sini dan bagaimana keluarganya, salary, dan kesejahteraan mereka. Paling tidak



mereka bisa kita panggil dalam jangka waktu pendek sehingga mereka tak kehilangan *income* yang mereka dapatkan di sana. Atau kita juga bisa kirim peneliti kita kesana,” tegasnya.

Jika ditilik dari potensi para peneliti yang ada di luar negeri, Indonesia memiliki banyak peneliti dengan beragam latar belakang keilmuan. Mereka bahkan dapat memajukan negara orang namun tidak di negeri sendiri. Pemerintah melalui Kemenristekdikti pada 2016 nanti berencana mengalokasikan dana untuk kesejahteraan peneliti. Ini dimaksudkan agar para peneliti mau kembali ke Indonesia. “Mulai dari gaji, fasilitas penelitian, hingga

akan membangun industri baru. Sehingga tak alasan bagi mereka untuk mengatakan, mau kerja apa di Indonesia,” ungkap M Nasir, Menristekdikti.

Nasir juga menyankan sedikitnya anak muda yang berminat menjadi peneliti dikarenakan minimnya kesejahteraan, penghargaan dan gaji para peneliti selama ini. Karenanya pemerintah pun merencanakan nantinya perguruan tinggi akan sering mengundang

profesor-profesor luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia dan menularkan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia hingga mereka menjadi doktor dan bisa berdiri sendiri. Dengan begitu tak ada alasan lagi untuk mereka menetap diluar negeri.

Pihaknya pun akan mulai melakukan pendekatan kepada para peneliti yang ada di luar negeri dengan menemui langsung dan mengajaknya pulang. Meski begitu dikatakan, ia tidak akan memaksa para peneliti untuk pulang ke Indonesia.

Pasalnya, cara paksaan justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi hal itu tak sesuai dengan cara kerja ilmuwan yang cenderung meneliti dengan rasa senang tanpa paksaan. Pihaknya juga telah berbicara dengan Kemenkeu untuk memberikan insentif dan tunjangan kepada peneliti. “Harapannya, bisa sampai Presiden dan dikeluarkan perpres,” tandasnya. Adapun dengan KemenPAN dan RB, ia akan meminta pemberian kepangkatan yang jelas bagi para peneliti. “Minimal bagi peneliti yang sudah tinggi bisa sejajar dengan guru besar,” pungkasnya.

PS/ dbs



Perkuat Jamu, Jaga Budaya

Produk jamu dipastikan akan jadi komoditas primadona di tanah air. Semua pihak lantas diajak bekerja sama untuk mendukung dan terus mengembangkan aset bangsa ini. “Lihat jamu sebagai budaya!” pinta Ibu Menko PMK.

“Gerakan minum jamu bersama yang sudah saya luncurkan dan terus berjalan di beberapa kementerian, ke depan (saya harapkan—red) tidak hanya sebatas acara seremonial saja tetapi juga bisa makin membudaya. Saya juga mewacanakan agar setiap bandara

kita ada gerai jamu, supaya jamu kita makin dikenal di dunia dan akhirnya jadi identitas asli bangsa,” demikian sambutan Menko PMK, Puan Maharani dalam kunjungan kerja dua hari ke Tawangmangu, Kab Karanganyar dan Kab Sukoharjo, di Jawa Tengah akhir Maret lalu.

Menko PMK, di hadapan pakar kesehatan khususnya pengelola

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Kemenkes RI, pejabat kementerian terkait, pelaku usaha jamu, dan para SKPD seprovinsi Jateng, kembali menegaskan kehadiran negara dalam mendukung jamu sebagai salah satu kekayaan negara baik secara keekonomian maupun budaya.

“Tadi, sewaktu meninjau kebun obat dan balitbang ini, Saya jadi merasa begitu bangga karena memang yang ada di sini sangat komplit dan berharga, begitu juga dengan manfaatnya,” papar menko lagi.

Secara khusus, Menko PMK mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu kekayaan bangsa ini dan mengajak semua pihak untuk mendukung baik sisi hukum berupa kepemilikan hak cipta dan paten bagi para pengusahanya, maupun dari sisi ilmiahnya berupa upaya saintifikasi jamu. Kalau sudah

kuat di berbagai lini, Menko PMK yakin akan tidak lagi masalah klaim bangsa lain terhadap aset bangsa yang asli milik Indonesia ini.

Secara terpisah, bentuk dukungan pemerintah ini disambut baik oleh pelaku usaha jamu. Perjuangan mereka sejak dulu agar jamu dapat dikenal luas, menurut Irwan Hidayat, baru pada era Pemerintahan Jokowi – JK ini benar-benar terlihat. “Jamu harus terus berkembang dan maju. Saya optimis jamu akan menjadi salah satu produk masa depan kita,” ujar Produsen jamu dengan merek Sido Muncul ini. Irwan juga optimis bila jamu dapat dijadikan pendamping dalam upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Sehat di waktu mendatang.

SAINTIFIKASI JAMU

Sebagai bagian dari tradisi dan budaya kesehatan tradisional, jamu sudah terakomodasi dalam Sistem Kesehatan Nasional melalui Undang-undang No.36/2009 tentang Kesehatan dan PP No.103/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Di beberapa negara berkembang, obat tradisional bahkan telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan kesehatan strata pertama. Negara-negara maju yang sistem pelayanan kesehatannya didominasi pengobatan konvensional pun kini menerima pengobatan tradisional, walaupun mereka menyebutnya dengan pengobatan komplementer/ alternatif (*complementary and alternative medicine*), misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di Asia, negara yang banyak menggunakan obat tradisional adalah Cina, Korea, India, dan termasuk Indonesia.

Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2010, menunjukkan bahwa 50 persen penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Data Riskesdas ini menunjukkan bahwa, jamu sebagai bagian dari pengobatan tradisional, telah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Meskipun pengobatan tradisional, termasuk jamu, sudah banyak digunakan oleh tenaga kesehatan profesional maupun battra (Praktisi pengobatan tradisional) tetapi banyak tenaga profesional kesehatan yang mempertanyakan pengobatan tradisional (jamu) dalam pelayanan kesehatan formal. Hal ini tentu dapat dimengerti karena sesuai dengan Undang-undang No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter/dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan medis, yang pada prinsipnya harus memenuhi kaidah praktik kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine*).

Di pihak lain, bukti-bukti ilmiah tentang mutu, keamanan dan manfaat pengobatan tradisional (jamu) dinilai belum digdaya untuk dapat dipraktikkan pada pelayanan kesehatan formal. Dengan kata lain, pengobatan tradisional (jamu) masih memerlukan bukti ilmiah yang cukup untuk dapat digunakan oleh tenaga profesional kesehatan.

Nah, untuk menyediakan bukti ilmiah terkait mutu, keamanan, dan manfaat obat tradisional (jamu), Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 03/MENKES/PER/2010 tentang Sainifikasi Jamu.

Sainifikasi Jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui

penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Salah satu tujuannya adalah memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empirik melalui penelitian berbasis pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini klinik pelayanan jamu/dokter praktik jamu. Untuk menjalankan Sainifikasi Jamu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 03/MENKES/PER/2010, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1334 Tahun 2010 tentang Komisi Nasional Sainifikasi Jamu, yang salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman metodologi penelitian jamu.

Sampai dengan tahun 2015, setidaknya terdapat lima jamu yang telah melalui serangkaian proses sainifikasi jamu dan dalam kunjungan Menko PMK ke B2P2TOOT kali ini, kelima jenis jamu itu pun secara resmi diluncurkan.

“Saya atas nama pemerintah mendorong dan mendukung sainifikasi jamu sebagai upaya melestarikan dan membudayakan jamu dalam kehidupan sehari-hari. Saya meluncurkan lima jamu saintifik yaitu jamu untuk hemoroid (wasir); dispepsia (nyeri lambung); osteoarthritis (nyeri sendi); hipertensi ringan; dan heiperursemia (kadar asam urat tinggi) agar dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan sesuai UU Kesehatan No.36/2009 dan PP NO.103/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Saya juga mengajak semua elemen bangsa Indonesia baik itu pemerintah, akademisi/ilmuwan, dunia usaha, dan komunitas masyarakat untuk bangga dan selalu mempromosikan jamu sebagai tradisi dan budaya kesehatan Indonesia,” demikian pernyataan resmi Menko PMK usai peluncuran lima jamu saintifikasi itu. **(IN)**



Upaya Preventif Penting dalam Hadapi Flu Burung

Pemerintah bergerak cepat mengidentifikasi dan melakukan tindakan preventif setelah dua orang warga Tangerang meninggal dunia terpapar flu burung. Kedepan, vaksinasi diharapkan menjadi upaya preventif jatuhnya korban flu burung.

Dua warga Tangerang, bapak dan anak meninggal dunia setelah terbukti positif terjangkit flu burung akhir Maret lalu. Awalnya bapak N, sempat mengalami panas, kemudian sesak nafas sampai kondisinya memburuk. Lantas menyusul anaknya, M yang berusia 2 tahun. Sewaktu di rumah sakit, keduanya sudah dicurigai dokter sehingga darahnya diambil. Keduanya meninggal dan hasil lab menunjukkan positif flu burung (H5N1).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Litbangkes Kemenkes kembali melakukan uji sampel usap tenggorokan (swap) T, istri N. sebelumnya pada uji sampel pertama dan kedua terhadapnya menunjukkan hasil yang negatif flu burung. Selain T, pemerintah juga melaksanakan survei pada sejumlah orang lainnya yang memiliki riwayat kontak dengan para almarhum dan unggas yang diduga menularkan flu burung pada mereka.

Melalui penelusuran epidemiologis yang dilakukan

pemerintah, diketahui bahwa kejadian bermula ketika N, pegawai Imigrasi Cabang Kelapa Gading, bersama keluarganya berlibur ke rumah orang tuanya di Bogor, Jawa Barat, awal Maret lalu. Kebetulan, pemilik rumah di Bogor memang hobi memelihara unggas. Ketika keluarga tersebut berkunjung, diketahui terdapat seekor burung hantu di sana yang kedapatan mati mendadak. Sembilan hari kemudian, M mengalami demam tinggi dan sempat dirawat di Eka Hospital dan dirujuk ke RSUP

Persahabatan, Jakarta. Empat hari usai M dirawat, pada 21 Maret, N, ayah M menunjukkan gejala serupa dan dirawat di RS Husada Insani, Tangerang. Usai dirawat empat hari, pada tanggal 24 Maret, yang bersangkutan akhirnya meninggal dunia.

Proses identifikasi penularan di lingkungan almarhum yang dilakukan pemerintah sendiri berlangsung selama 14 hari. Sebagai langkah preventif pemerintah menyalurkan 16 ribu oseltamivir (obat antiinfluenza) ke Kota Tangerang. Pemerintah setempat bahkan langsung memusnahkan 30 ekor merpati yang positif terinfeksi virus flu burung H5N1. Sebelum dimusnahkan, pemerintah setempat memang telah mengambil air liur dari setiap burung untuk diperiksa dan diketahui hasilnya positif mengandung H5N1. Burung merpati yang dimusnahkan tersebut milik warga dan berada dekat korban meninggal akibat suspect flu burung. Pemusnahan burung tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Disamping itu, pemerintah setempat pun melakukan penyemprotan kandang burung yang ada di sekitar lokasi. Untuk penyemprotan itu, kelurahan setempat diberikan dua liter desinfektan.

Langkah antisipatif juga mulai dilakukan Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Jakarta, serta Pemkot Depok. Pemkot Bekasi tak mau kecolongan dua kali, terlebih lagi pada 2013, dua warganya tewas dan dinyatakan positif flu burung H5N1. Guna mengantisipasi munculnya penyakit mematikan itu, kini Pemkot Bekasi, secara periodik melakukan vaksinasi terhadap unggas peliharaan. Setidaknya dilakukan dua kali vaksinasi dalam setahun. Sasarannya,

Bird flu and danger to humans

Bird flu, or avian flu, has a high mortality rate in humans, but as of yet, can ~~not~~ be transmitted from person to person.

WHO, February 20th, 2006: "Human infections remain a rare event."

Infection with type A virus H5N1

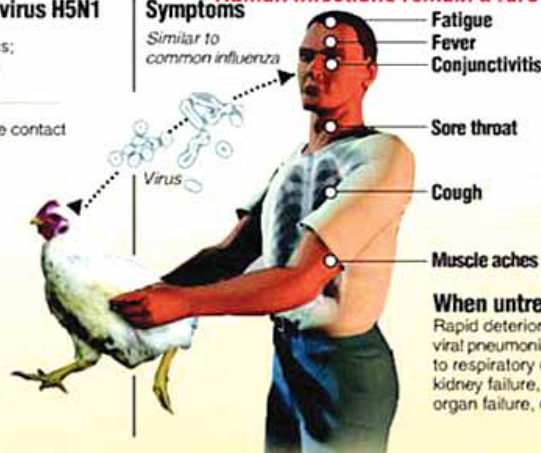
- 1 Most virulent bird flu virus; mutates rapidly, altering its genetic material
- 2 Humans infected by close contact with live infected poultry
- 3 Birds carry virus and excrete it in feces, which dries, becomes pulverized and then can be inhaled or taken in by touch
- 4 Humans have no immunity against this virus

Reason for concern

Humans infected with bird flu could serve as a host for a new genetic subtype that can be transmitted from person to person

Symptoms

Similar to common influenza



When untreated

Rapid deterioration; viral pneumonia leading to respiratory distress, kidney failure, multi-organ failure, death

Might start influenza pandemic



Source: World Health Organization Graphic: Julia Scheibe, Morten Lythne

© 2004 KRT

unggal peliharaan jenis ayam, burung, dan bebek. Sementara Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Depok, dengan rutin menggelar program surveilans dan vaksinasi pada unggas di beberapa kecamatan di Kota Depok. Kegiatan tersebut untuk mendata banyaknya unggas. Bila ditemukan tanda atau gejala penyakit pada unggas, dilakukan vaksinasi.

Sebagai informasi selama tahun 2005-2012 tercatat kasus flu burung/virus H5N1 yang terjadi di Banten sebanyak 32 kasus dengan korban yang meninggal dunia 29 orang. Adapun sepanjang 2013 – 2014 tidak ada kasus flu burung di wilayah ini. Penularan virus flu burung sesungguhnya dapat dicegah kalau melakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat diminta menjaga kebersihan diri seperti selalu cuci tangan pakai sabun. Lokasi kandang ternak pun dihindari tidak berdekatan dengan rumah tinggal. Kalau ada warga

yang sakit demam untuk segera berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Sementara jika ada masyarakat yang pernah kontak dengan unggas, atau dengan korban flu burung, lantas mengalami demam, biasanya mereka akan diberikan obat antiviral oseltamivir oleh pemerintah.

Tentang PHBS, Deputy Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB, Rahmat Sentika di beberapa kesempatan kerap menekankan hal tersebut. Menurutnya, potensi terjangkitnya flu burung dapat diturunkan hingga 30% hanya dengan mandi pakai sabun. Rahmat mengajak masyarakat agar biasa mandi dengan sabun empat kali dalam sehari. Itu bisa dilakukan ketika pagi hari, selesai aktivitas, dan sebelum tidur. Adapun cuci tangan dengan sabun pun perlu dilakukan yakni tiga kali pada setiap mau makan, dua kali sewaktu mandi, dua kali setelah dari toilet, satu lagi ketika pulang dari tempat bermain.

PS/ dbs



BONUS DEMOGRAFI HARUS BERKUALITAS

Pada tahun 2045 Indonesia diperkirakan berada pada urutan ke 7 negara besar dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan SDM yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini.

Pada periode 2020-2045, Indonesia akan mencapai bonus demografi. Pembangunan keluarga sangat penting untuk diimplementasikan semaksimal mungkin guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN Tahun 2015 di Jakarta, Senin

(30/03/). Rakernas BKKBN ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dan Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Ambar Rahayu.

Dalam sambutannya, Menko PMK menegaskan bahwa 2015 ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan RPJMN 2015- 2019. Seluruh jajaran BKKBN pusat dan provinsi harus dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat kerja

sama dengan seluruh mitra kerja/ stakeholders untuk dapat mencapai target atau sasaran yang sesuai dengan RPJMN/Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Berdasarkan proyeksi penduduk 2010, pada 2015 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia ada 253,7 juta dengan angka fertilitas total sebesar 2,37 anak. Jika tingkat kebergantungan atau rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia nonproduktif ditanggung oleh usia produktif maka tingkat

kebergantungan Indonesia sebesar 0,49 dan tingkat kebergantungan akan menurun pada periode 2020-2045.

Hal ini menunjukkan pada periode tersebut Indonesia akan mencapai bonus demografi yang kerap diinterpretasikan sebagai jendela peluang (*window of opportunity*) bagi Indonesia di masa depan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Untuk itu, program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga sangat penting untuk diimplementasikan semaksimal mungkin guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Menko PMK berharap BKKBN memberikan perhatian khusus, seperti perlunya penguatan dari sisi advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Di samping itu, lanjut Menko PMK, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan perlunya penguatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga.

BELUM MAKSIMAL

Meski demikian, pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Menurut, Menko PMK, kondisi itu terlihat dari beberapa indikator program kependudukan dan keluarga berencana yang tidak mencapai target.



Contohnya, Laju Pertumbuhan Penduduk (**LPP**) naik dari 1,45% menjadi 1,49% (padahal targetnya 1,27%), **Total Fertility Rate (TFR)** bahkan dalam 10 tahun terakhir stagnan di angka 2,6 per perempuan usia reproduksi, kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (**unmet need**) dari pasangan usia subur naik dari 9,1% (SDKI 2007) menjadi 11,4%(SDKI 2012) padahal targetnya adalah 5 % dan masih banyak indikator lain yang targetnya belum dapat dicapai.

“Apabila kondisi ini terus terjadi, dikhawatirkan ledakan jumlah penduduk Indonesia betul-betul akan menjadi kenyataan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Meski demikian, diakuiinya, sebetulnya, jumlah penduduk yang besar merupakan berkah, apabila SDM negara ini berkualitas. Terlebih, visi ke depan yaitu pada tahun 2025 Indonesia merupakan negara maju dan merupakan kekuatan 12 negara besar dunia. Bahkan diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia berada pada urutan ke 7 negara besar dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Namun yang terjadi pada SDM kita, khususnya SDM di usia produktif kualitasnya rendah. Sebagian besar SDM usia produktif kita tidak lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) bahkan Sekolah Dasar. Rendahnya kualitas SDM kita, di samping akan menjadi beban pembangunan yang sedang kita laksanakan,” ujarnya.

Kondisi ini juga akan dapat memupus peluang bangsa ini untuk memperoleh suatu “*bonus demografi*” yang akan terjadi pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai tahun 2035, yaitu meningkatnya porsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen dari total jumlah penduduk. Untuk dapat menikmati bonus demografi ini ada persyaratan penting yang harus dimiliki yaitu kompetensi dan harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

“Melalui kerja keras kita bersama, saya yakin permasalahan kependudukan di Negara kita dapat diatasi dengan baik. Jumlah penduduk yang besar bukan lagi menjadi beban pembangunan, tetapi justru akan menjadi kekuatan jika berkualitas,” tegasnya.(yn)

PERKUAT KERJA SAMA DEMI GIZI BANGSA

Masalah gizi bangsa masih jadi pekerjaan besar bagi bangsa yang tengah berjuang mewujudkan generasi unggul ini. Kerja sama pun dilirik sebagai salah satu upaya pendukung.



Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo, pertengahan April lalu berkesempatan memberikan arahan dalam rapat koordinasi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI dengan WFP di Jakarta. Sesemenko PMK didampingi oleh Representative and Country Director WFP Indonesia, Anthea Webb. Rakor dihadiri oleh para pejabat yang dari kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian kesehatan, kementerian Sosial, Badan Ketahanan Pangan, Kemtan,

Kemenko PMK, Pemprov NTT, Pemkab Kupang, Pemkab TTS, Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, Pemkab. Jayapura dan Pemprov DI Yogyakarta.

Rakor ini membahas tiga komponen yang meliputi penguatan kapasitas dalam monitoring, analisa dan pemetaan ketahanan pangan; kesiapsiagaan dan tanggap darurat; dan gizi khususnya tentang menurunkan dan mencegah gizi kurang.

WFP Indonesia, terkait dengan masalah gizi kurang, terus membantu Indonesia mengatasi masalah paling mendasar dalam

keseharian bangsa ini terutama di kantong-kantong gizi buruk seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Peneliti masalah gizi balita, Linda Wibowo, pola penanganan gizi bayi di bawah lima tahun (balita) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah masuk tahapan kronis akibat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tuntas.

Persoalan yang ada sangat beragam dan berbeda di setiap daerah di wilayah provinsi kepulauan itu. "Ada yang memang kekurangan pangan, ada yang tercukupi tetapi tidak bisa

dikelola, dan ada juga yang karena keduanya,” kata Linda seperti dikutip dari *Merdeka*.

Linda mengungkapkan, pola masalah gizi balita di Nusa Tenggara Timur, dengan 16 sampel daerah kabupaten/kota yang ada, untuk gizi kurang dan gizi buruk, yang tertinggi ada di Kabupaten Rote Ndao dengan 40,8 persen, menyusul kemudian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah 40,2 persen. Persentase terendah ada di Kota Kupang dengan angka 14,6 persen.

Sementara untuk masalah gizi dengan proyeksi anak bertubuh pendek (*stunting*) dan sangat pendek, terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan jumlah 59,6 persen dan masuk kategori sangat tinggi, menyusul Kabupaten TTS dengan jumlah 57,0 persen, Rote Ndao 54,2 persen.

Data Dinas Kesehatan Provinsi NTT menunjukkan, dalam kurun waktu Januari-Desember 2014, enam balita meninggal di Nusa Tenggara Timur karena gizi buruk. Mereka merupakan bagian dari 13 balita gizi buruk dengan gejala klinis.

Kepala Dinas Kesehatan NTT Dokter, Stef Bria Seran, mengatakan, gizi buruk muncul karena orang tua tidak mampu menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak mereka yang kemudian memicu timbulnya berbagai jenis penyakit.

“Akar permasalahan gizi di NTT itu kemiskinan,” ujarnya ketika berbicara pada Workshop Penguatan Jurnalis untuk Advokasi di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak di Kupang, Maret lalu.

Menurut Stef, angka kefatalan kasus (*case fatality rate/CFR*) enam balita yang meninggal hanya 0,002 persen tapi kematian bayi merupakan persoalan serius. Persoalan itu bukan tanggung



jawab Dinas Kesehatan, melainkan pemerintah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Selama 2014, sebanyak 361.696 anak ditimbang. Dari jumlah itu, 310.497 orang di antaranya gizi normal dan 27.327 orang yang gizinya bermasalah terdiri dari gizi kurang 23.963 orang, gizi buruk tanpa gejala klinis 3.351 orang dan gizi buruk dengan gejala klinis 13 orang.”

Stef yakin kalau gizi buruk baru berhasil diatasi jika persoalan kemiskinan di daerah itu dientaskan jika masyarakat punya kehidupan yang layak, karena orang tua yang tidak memiliki cukup uang, tidak akan membeli bahan makanan bergizi untuk anak-anak mereka.

Selain faktor kemiskinan, masalah gizi kurang dan gizi buruk di tanah air juga dapat disebabkan oleh pola asuh anak oleh orang tua yang dapat disebabkan oleh faktor budaya dan pemahaman yang baik.

Menurut Dosen pada Fakultas Gizi dan Kesehatan UGM, Fatma Zuhrotun Nisa, balita yang besar dalam keluarga miskin akan tumbuh sehat apabila anak diasuh oleh orang tua yang memahami pentingnya kesehatan. Dia mencontohkan bahwa ada anak yang kedua orang tuanya bekerja sebagai PNS yang

berkecukupan ternyata mengalami gizi buruk. Hal ini terjadi karena pengasuhan anak diserahkan pada nenek yang memiliki keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pemberian makanan bergizi.

“Kebanyakan yang terjadi karena pengasuhan diberikan pada orang dengan pemahaman akan gizi rendah seperti nenek sehingga anak hanya diberikan makanan seadanya, bahkan pola makan juga tidak menentu.”

Guna mengantisipasi bertambahnya kasus gizi buruk, diperlukan peningkatan pengetahuan akan pola asuh anak yang baik dan benar. Selain itu, meningkatkan keterampilan kader posyandu yang masih tergolong rendah juga perlu dilakukan

“Selama ini gizi buruk hanya diidentikan dengan bobot badan yang kurang, padahal juga ditentukan dari tinggi badan per usia. Jadi tubuh pendek itu juga termasuk dalam gizi buruk,” kata Fatma lagi.

Pengukuran tinggi badan balita belum banyak dilakukan di posyandu karena kurangnya alat. Kalau pun ada, pengukuran belum dilakukan secara standar. “Masalah *stunting* ini belum jadi perhatian, padahal ini termasuk dalam gizi buruk. Untuk itu, penting meningkatkan keterampilan kader posyandu.” (IN)



Judul Buku : Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing
 Penulis : Prof. Dr. Dedy Mulyasana, M. Pd.
 Penerbit : Remaja Rosdakarya, Bandung
 Tahun Terbit : September 2011

Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik, mengurus soal ujian, menetapkan kriteria kelulusan, atau sekadar mencetak ijazah. Pendidikan merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan ketidakjujuran.

Karena itu, proses pendidikan tidak terbatas pada hafalan dan latihan penguasaan soal-soal ujian. Proses pendidikan, selain diarahkan pada pembentukan semangat, motivasi, kreativitas, keuletan, dan kepercayaan diri, juga ditekankan pada pembentukan kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan budaya belajar yang baik. Proses pendidikan semacam itu dapat dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik. Itulah pendidikan bermutu.

Namun, di era kompetisi saat ini mutu saja tidaklah cukup guna membangun lembaga pendidikan yang unggul. Para pengelola lembaga pendidikan harus mampu

AGAR PENDIDIKAN LEBIH BERMUTU

menjadikan lembaganya berdaya saing.

Lantas, bagaimana cara menciptakan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing? Dalam buku ini, Guru Besar Manajemen Pendidikan, Dedy Mulyasana memaparkan modal dan sikap yang diperlukan, konsep yang cocok dikembangkan hingga konsep manajemen demi menciptakan pendidikan berdaya saing,.

Untuk memenangkan persaingan, tegas penulis, para penyelenggara pendidikan setidaknya mempunyai sikap kompetitif dalam menjalankan tugas kelebagaannya. Terkait hal itu, pimpinan perlu melakukan analisis kebutuhan peserta didik serta memetakan kecenderungan dan kekuatan persaingan, menetapkan standar mutu, dan merumuskan tuntutan kebutuhan dan kecenderungan lingkungan.

Analisis kebutuhan yang dilakukan harus bersifat faktual dan terukur. Itu sebabnya, analisis kebutuhan belajar atau pendidikan didasarkan atas perhitungan tentang potensi yang ada, permasalahan yang terjadi, kecenderungan ke depan, dan tuntutan perubahan serta tantangan masa depan.

Daya saing yang dimaksud ialah upaya lembaga pendidikan mempersiapkan masa depan peserta didiknya di tengah kompleksitas tantangan zaman.

Dalam konteks itulah, penulis merumuskan beberapa langkah strategis, antara lain, memastikan bahwa lebih dari setengah komponen organisasi mengandung keunggulan bersaing (SDM, sumber dana, sarana dan prasarana belajar, visi, misi,

program, strategi, jaringan dan kerjasama, kepemimpinan, daya dukung masyarakat dan sebagainya).

Kedua, selalu memperbarui misi, program, dan strategi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, kritis terhadap berbagai strategi yang diterapkan dan peka terhadap strategi baru yang diterapkan oleh para pesaing. Keempat, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan jasa pendidikan. Karena itu, pimpinan lembaga pendidikan tidak cuma menjual gedung, fasilitas pendidikan, dan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga menjual kepercayaan yang di dalamnya ada profesionalisme, kelayakan, dan kepuasan.

Kelima, selalu berada pada waktu yang tepat, bersama orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Keenam, efisien dalam menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dan dana, sehingga dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan tugas. Ketujuh, senantiasa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan semua pihak.

Langkah-langkah tersebut dalam rangka memperkuat kualitas lembaga pendidikan sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan daya saing.

Walhasil, strategi pendidikan bermutu dan berdaya saing sebagaimana ditawarkan dalam buku ini dapat menjadi bahan kajian bagi para akademisi, praktisi, pimpinan lembaga pendidikan agar selalu menggenggam spirit adu cepat dengan jaminan nantinya akan sampai lebih dulu di garis finis persaingan.



Judul :

365 Hari Berpikir Positif

Penulis :

Brook Noel

Penerjemah :

Maria Asri&Nyi Indah Kristiani

Penerbit : Daras Books, Jakarta

Tahun Terbit : Januari 2010

Kesuksesan maupun kebahagiaan lebih banyak dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Kita sendirilah yang harus memutuskan apakah kita ingin bahagia atau tidak. Robert J Hasting mengatakan, "Begitu kita mengambil keputusan, maka kebahagiaan itu akan datang." Salah satu cara berpikir yang ampuh adalah berpikir positif.

Hal ini dibuktikan, misalnya, oleh Miss Universe tahun 2005, Natalie Glebova, saat ditanya oleh juri, "Apa yang Anda anggap paling penting dalam hidup Anda?" Dengan yakin dia menjawab, "Saya selalu belajar dan mencoba untuk berpikir positif. Dengan berpikir positif akan memberikan dampak cukup kuat pada kedamaian dunia." Konon, jawaban itulah yang membuatnya terpilih menjadi Miss Universe tahun 2005.

Masih perlu bukti tentang dahsyatnya berpikir positif? Kali ini datang dari para ilmuwan yang telah membuat kesimpulan atas riset selama puluhan tahun tentang manfaat berpikir positif dan optimisme bagi kesehatan. Hasil riset menunjukkan bahwa seorang

BERPIKIR POSITIF JADI BAHAGIA

yang optimistis (baca: berpikir positif) lebih sehat dan lebih panjang umur dibanding orang lain apalagi dibanding dengan orang pesimis. Para peneliti juga memperhatikan bahwa orang yang optimistis lebih sanggup menghadapi stres dan lebih kecil kemungkinannya mengalami depresi.

Bagaimana caranya agar senantiasa berpikir positif setiap hari? Brook Noel, memberikan solusinya, yaitu dengan menulis catatan harian. Catatan harian bagaikan rekaman video yang terus menerus merekam semua perilaku dan aktivitas kita. Rekaman seperti itulah yang kita butuhkan untuk mengevaluasi setiap langkah yang kita ambil. Rekaman itu akan membantu kita untuk tetap terjaga dan memungkinkan kita untuk secara bertahap mengurangi dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita.

Buku ini menawarkan inspirasi, konsep, dan strategi yang cemerlang untuk membantu anda menjalani kehidupan terbaik anda setiap hari dengan pengharapan yang positif. Dengan menjalaninya, maka anda diarahkan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap hari yang anda jalani.

Noel menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan tekad dalam bentuk tertulis, 86 persen lebih mungkin untuk mencapai apa yang mereka tulis dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan pernyataan tegas tertulis.

dalam buku ini pula Noel berusaha agar dirinya dan pembaca juga tidak membiarkan masa lalu atau pun masa depan mengendalikan

kehidupannya sehari-hari. Kita bisa belajar dari masa lalu dan memberikannya energi untuk kembali terulang dalam kehidupan kita yang sekarang. Sebaliknya, mari kita menarik pelajaran dari masa lalu itu dan menerapkannya hari ini.

Pada intinya, buku ini adalah semacam panduan menuju hidup lebih baik dari hari ke hari. Dengan mencatat visi dan misi, masalah dan solusi, serta rencana-rencana, diharapkan kita meraih segala keinginan-keinginan kita yang positif tersebut.

Anda akan mendapatkan pesan positif dalam buku ini setiap hari dalam setahun, 365 hari. Jika kita seorang yang berpikiran positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya, kita lebih berkonsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dengan berpikir positif, kita akan termotivasi untuk melihat jauh ke depan, sehingga kesulitan hari ini tidak akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk maju. Ibarat menyeruput secangkir teh di pagi hari sembari makan pisang goreng, buku ini adalah aktivitas anda yang bisa anda nikmati setiap pagi sebagai sumber kekuatan mental dalam menjalani hari yang penuh tantangan.

Kini, saatnya anda membuktikan sendiri. Menjadi orang yang sukses dan bahagia.

KIP BUKTIKAN KEHADIRAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN

Agar tidak lagi anak usia sekolah yang putus pendidikannya, begitu juga dengan makin berkurangnya angka buta huruf, Program Indonesia Pintar diluncurkan.



Sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan tunai untuk pengeluaran personal pendidikan melalui Program

Indonesia Pintar kepada sekitar 20,3 juta anak usia sekolah yang berasal dari para keluarga penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk

masing-masing anak. Termasuk di dalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, *Different Abilities People* (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – siswa sekolah– yang belajar di pondok pesantren. KIP akan dibagikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagai salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini bertujuan untuk membantu keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu hingga tingkat SMA/SMK/MA, mengurangi angka putus sekolah, dan mendorong keikutsertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

“Mereka akan mendapatkan bantuan tunai pendidikan dengan syarat mereka harus mendaftarkan diri mereka ke lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Setelah itu, mereka akan didaftarkan sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar untuk disahkan oleh pemerintah,” ujar Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, kepada media dalam acara sosialisasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang difasilitasi oleh TNP2K RI di Jakarta awal April lalu.

Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamarudin Amin, peserta didik di lembaga nonformal meliputi Kelompok Belajar (Kejar) Paekt A,B, dan C; lembaga-lembaga kursus dan pelatihan yang terdaftar di Kemendikbud dan Kemenag serta Pondok Pesantren.

“Para santri yang mengikuti pendidikan mengaji di pondok pesantren, usia 16 – 21 tahun dan memenuhi kriteria juga akan mendapatkan KIP sehingga berhak mendapatkan bantuan tunai pendidikan.”

Dalam siaran resmi bersama antara Kemenko PMK, Kemendikbud, dan Kemenag, hingga akhir tahun

2014, KIP diketahui telah dibagikan kepada sekitar 160 ribu siswa sekolah yang terdaftar di sekolah umum dan madrasah yang ada di 19 kabupaten/kota, sementara KIP yang akan dibagikan pada tahun 2015 ini meliputi 11,3 juta siswa SD/MI/ sederajat; 5,2 juta tingkat SMP/ Madrasah Tsanawiyah/ sederajat; dan 3,8 juta tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat.

Dijelaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud, Thamrin Kasman, dari jumlah 20,3 juta calon penerima KIP, sebanyak 17,9 juta merupakan calon penerima yang berada di bawah Kemendikbud sedangkan sisanya, di bawah Kementerian Agama. Dari jumlah 17,9 juta calon penerima itu, sebanyak 3,6 juta anak telah putus sekolah sehingga tidak dapat diverifikasi.

Adapun besaran bantuan tunai bagi anak-anak penerima KIP itu adalah Rp225 ribu per semester untuk tingkat SD/MI/ sederajat; Rp375 ribu per semester untuk tingkat SMP/MTs/ sederajat; dan Rp500 ribu per semester untuk tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat.

“Kami akan memprioritaskan anak kelas VI, IX, dan XII. Karena itu adalah masa di mana mereka akan melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya. Kami ingin bisa menjangkau lebih banyak anak lagi, terutama anak-anak yang putus sekolah. Begitu lelang selesai dan pemenang tender sudah diumumkan, maka pemerintah akan langsung bayar,” kata Agus lagi. Dengan begitu, diharapkan siswa sudah dapat menerima KIP sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Namun, terkait mengenai adanya penyalahgunaan dana bantuan itu, Agus menilai ada kemungkinan. Bukan dari pihak pemerintah tetapi penyalahgunaan rentan dilakukan

oleh para orang tua yang anaknya mendapatkan KIP. “Dana itu untuk kepentingan sekolah, seperti beli seragam atau buku. Jangan sampai nanti malah untuk beli rokok orangtuanya.”

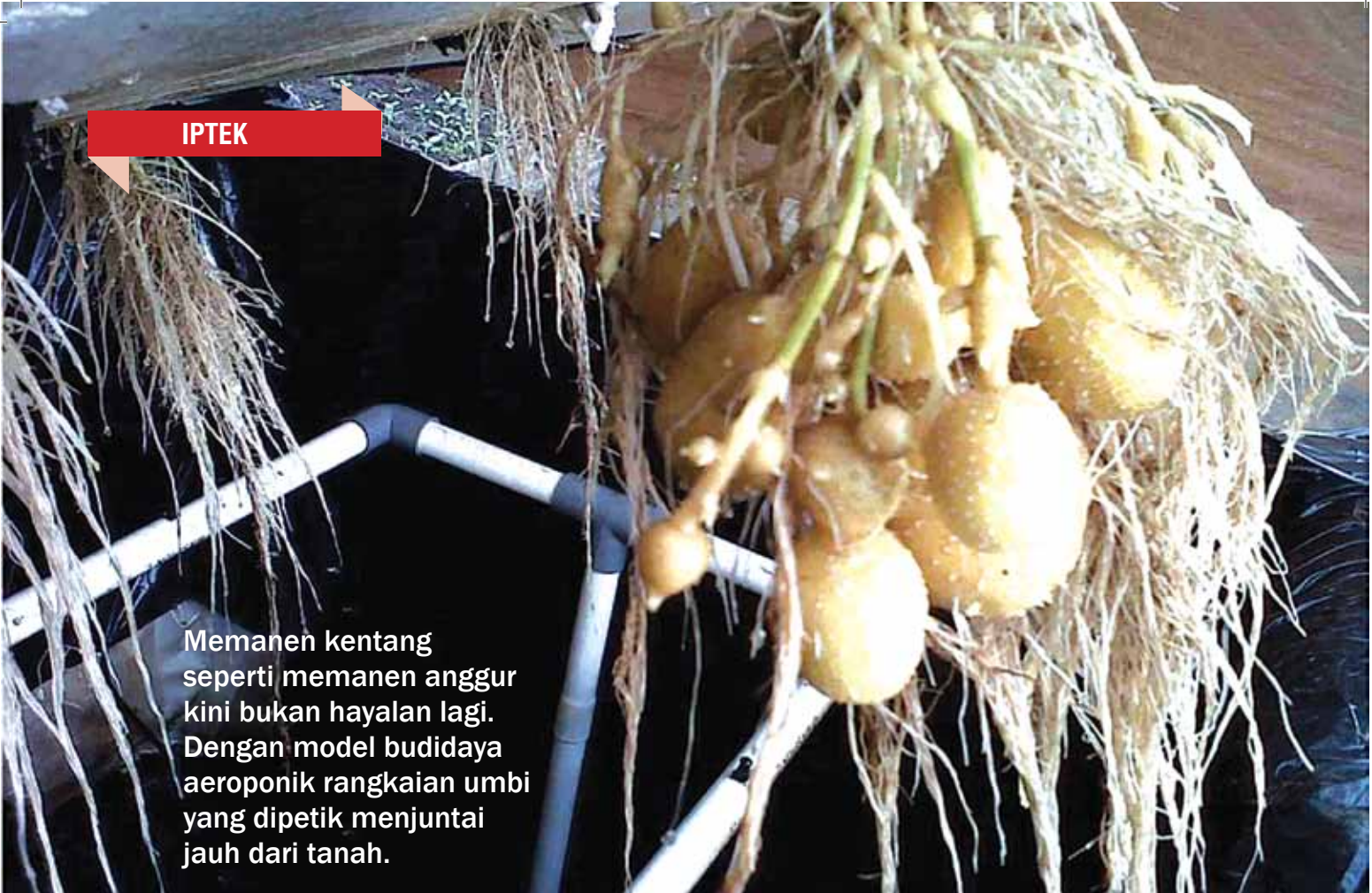
Di sisi lain, Thamrin menilai, pemerintah daerah harus giat memberikan edukasi kepada para orangtua agar dana itu benar-benar dialokasikan untuk pendidikan anak. “Kami lakukan pengawasan ke pemda dan sekolah, tetapi tidak mungkin bisa diawasi semuanya.”

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyatakan, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera pada akhir April 2015. Peluncuran tiga kartu sakti itu akan dilakukan serentak di 12 kabupaten atau kota pada sembilan provinsi.

Puan menuturkan, sosialisasi peluncuran tiga kartu sakti akan mulai dilakukan. Seluruh pihak terkait terus melakukan koordinasi dan penyempurnaan sistem agar kisruh tidak terjadi usai peluncuran.

“Khususnya masalah data, siapa saja penerima agar bisa sesuai target. Lalu teknis penerimaan dan kapan kartu itu bisa digunakan,” kata Puan usai rapat koordinasi tingkat menteri di gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Sementara Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa memastikan, kementeriannya sudah melakukan verifikasi dan validasi data penerima tingkat ruku tetangga (RT). Terkait lokasi peluncuran, Khofifah mengatakan pemerintah memiliki kriteria tertentu untuk memilih lokasi-lokasi itu. Salah satu kriterianya adalah lokasi peluncuran yang merupakan konsentrasi komunitas pesantren, buruh, nelayan, dan petani. (IN)



Memanen kentang seperti memanen anggur kini bukan hayalan lagi. Dengan model budidaya aeroponik rangkaian umbi yang dipetik menjuntai jauh dari tanah.

MENANAM KENTANG DI UDARA

Budidaya tanaman kentang pada umumnya masih konvensional dan tradisional yang masih menggunakan teknologi turun temurun. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi kentang disamping menggunakan pupuk yang cukup juga dengan memakai bibit kentang yang baik dan terbebas dari hama dan penyakit. Namun sebenarnya ada teknologi yang dapat meningkatkan kualitas bibit kentang secara menakjubkan yaitu dengan sistem aeroponik, dimana bahan tanamnya berasal dari hasil kultur jaringan yang telah di stek 3 (tiga) kali.

Sistem budidaya aeroponik dapat bercocok tanam dengan sistem pengkabutan, di mana akar

tanamannya menggantung di udara tanpa media (misalkan tanah), dan kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan cara spraying ke akarnya.

Di dalam sistem aeroponik, tanaman memang tidak diberi media untuk tumbuhnya akar, melainkan dibiarkan terbuka, menggantung pada suatu tempat yang dijaga kelembabannya. Dengan teratur, akar dan tubuh tanaman yang terbuka ini disemprot dengan larutan pupuk yang mengandung nutrisi tanaman.

Karena akar tumbuhan dibiarkan terbuka, maka pengambilan oksigen menjadi jauh lebih lancar. Dampaknya, metabolisme tumbuhan juga akan berlangsung jauh lebih cepat. Ini berarti, pertumbuhan juga akan berlangsung lebih cepat, hingga

tanaman lebih cepat besar dan menghasilkan.

Teknik aeroponik sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, penggunaannya untuk budidaya kentang baru dimulai beberapa waktu terakhir. Di Indonesia, teknologi ini memang belum banyak dilakukan. Padahal dengan teknologi ini bisa menghasilkan benih berkualitas karena dengan metode ini benar-benar terpantau agar terbebas dari hama dan penyakit.

Penerapan teknologi aeroponik ini, sebenarnya sangat sederhana. Pengadaan peralatannya juga mudah. Khusus untuk pembibitan kentang, syarat utama yang dibutuhkan adalah lokasi dengan ketinggian dan suhu udara yang sesuai dengan karakter

kentang. Agar suhu udara konsisten dan hama penyakit tak mudah masuk, budidaya dilakukan di dalam screenhouse.

Tanaman Kentang menghendaki iklim yang ideal dengan suhu rata-rata harian 18 - 24°C, dengan kelembapan 70 – 90%, sedangkan sinar matahari 15 s/d 18°C. Kombinasi suhu rendah dengan penyinaran matahari yang relatif pendek dapat berpengaruh baik terhadap pembentukan dan perkembangan umbi kentang. Kelembapan berpengaruh terhadap evapotranspirasi yaitu tenaga pengisap untuk mengangkat air dan hara (nutrisi) dari akar ke tajuk tanaman.

Akan tetapi bila kelembapan udara terlalu tinggi maka evapotranspirasi akan kecil. Kelembapan yang tinggi bisa disebabkan oleh jarak tanam yang terlalu rapat dan tajuk tanaman yang terlalu rimbun, sehingga akan mengundang penyakit cendawan. Sedangkan apabila kelembapan terlalu rendah, maka evapotranspirasi akan meningkat sehingga air akan menguap lebih banyak yang diserap oleh akar, akibatnya sel tanaman kehilangan tekanan turgor, jaringan mengkerut, dan tanaman akan menjadi layu.

Untuk kebutuhan fotosintesis yang perlu diperhatikan adalah intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman terlalu besar, maka gelombang cahaya yang diterima oleh daun akan berubah menjadi panas. Sehingga terjadi perubahan fisiologis dalam jaringan sehingga klorofil akan rusak dan warna daun menjadi kuning atau kebakar.

TEKNIK BUDIDAYA

Untuk memulai budidaya dengan sistem Aeroponik harus dipersiapkan terlebih dahulu lahan screen house. Lahan screen house

dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari bambu atau kayu, dengan beratapkan plastik UV dan berdindingkan kain kasa. Untuk konstruksi bangunan disesuaikan dengan kondisi lahan. Pembuatan instalasi untuk pertanaman dengan menggunakan bak yang terbuat dari fiberglas atau plastik lainnya yang atasnya ditutup dengan menggunakan sterofom yang terlebih dahulu sudah di lubang.



Proses selanjutnya dilakukan persiapan bibit kentang yang digunakan yaitu hasil dari perbanyakan di kultur jaringan. Proses pembenihan melalui kultur jaringan dilakukan dengan cara mengambil bagian jaringan dari kentang, kemudian jaringan tersebut ditanam di media potato dextros agar (PDA). Saat tanaman telah berumur 3 minggu dan telah memiliki 5 – 7 helai daun, maka tanaman tersebut sudah bisa dipindah ke lahan pertanaman aeroponik (screen house).

Pembibitan juga dapat dilakukan secara konvensional yaitu menyemaikan benih kentang pada media persemaian. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara vegetatif yakni menggunakan umbi mikro dan stek mini.

Tahapan selanjutnya yakni proses penanaman. Pada waktu penanaman perlu dilakukan sortasi tanaman terlebih dahulu. Selanjutnya tanaman tersebut dibuka medianya

dengan hati-hati agar akar tanaman tidak putus. Tanaman lalu dimasukkan ke dalam larutan fungisida yang bertujuan untuk mencegah dari penyakit tanaman.

Tanaman kentang kemudian dimasukkan ke dalam lubang styroform dan dibiarkan tumbuh secara melayang. Jangan lupa menutupnya dengan menggunakan rockwool atau busa. Sedangkan akar dibiarkan menggelayang tanpa media dan di bawah akar tersedia bak berisi larutan nutrisi (larutan hara). Larutan hara ini dialirkan melalui sprinkler secara otomatis selama 18 jam dalam 1 hari.

Setelah bibit tertanam maka proses pemeliharaan sangat penting agar pertumbuhan tanaman dapat berjalan dengan baik. Pemeliharaan tanaman kentang pada sistem aeroponik di antaranya adalah mengecek sprinkler agar nutrisin yang disemprotkan berjalan lancar.

Daun kentang yang sudah menguning dilakukan penyetekan. Bersihkan permukaan styroform dari daun-daun kentang yang sudah mengering. Untuk menjaga agar tanaman kentang tidak roboh dapat diberi ajir.

Selain itu, perlu dilakukan pengecekan suhu dan kelembapan dengan menggunakan thermohygrometer serta mengecek kepekatan larutan hara dengan menggunakan EC dan pH meter. Untuk pemupukan tambahan dilakukan 1 kali dalam seminggu sedangkan pupuk yang digunakan sesuai dengan kondisi tanaman.

Tanaman kentang aeroponik memasuki masa pemanenan sekitar sekitar umur 50 hari atau telah nampak tanda-tanda panen yaitu hampir seluruh daun kentang pertumbuhannya menurun. Tiap satu tanaman kentang rata-rata mampu menghasilkan 30 umbi kentang. **(sumber: Balai Penelitian Tanaman Sayuran).**

PROPAGANDA REVOLUSI MENTAL

Achmad Gunawan

Istilah revolusi mental pernah digunakan Karl Marx tahun 1869, dalam bukunya *"The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte"*. Marx mencoba menggambarkan konflik yang terjadi di Prancis, bahwa revolusi mental dapat menekan kepercayaan tradisional yang dianggap kurang baik saat itu. 145 tahun kemudian, melalui opini Harian Kompas tanggal 10 Mei 2014, Presiden Jokowi yang saat itu masih berstatus sebagai Capres menggunakan lagi istilah revolusi mental.

Lalu bagaimana kaitan konsepsi Marx tentang revolusi mental dan konsepsi revolusi mental yang disampaikan Presiden Jokowi? Ada, namun sebatas bagaimana revolusi mental dapat merubah paradigma, mindset, dan budaya politik menjadi lebih baik. Dalam opininya di Kompas disampaikan bahwa revolusi mental yang diusulkannya dilatar belakangi diperlukannya upaya menyelesaikan persoalan bangsa yang tidak hanya dapat diselesaikan dengan reformasi kelembagaan saja. Dijelaskan juga bahwa tujuan revolusi mental adalah mewujudkan cita-cita proklamasi: Indonesia yang Bersatu, Adil, Makmur. Jadi pada intinya beliau menyampaikan perlunya percepatan secara ekstrem menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter di segala bidang kehidupan.

Selanjutnya tulisan ini bukan untuk meramaikan perdebatan pro-kontra terkait konsepsi revolusi mental yang disampaikan Presiden Jokowi. Karena diskusi yang semestinya berkembang saat ini adalah bagaimana secara teknis revolusi mental itu benar-benar merubah budaya yang kurang baik yang ada di masyarakat Indonesia, yang tercermin paling tidak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagi Pemerintah, kebijakan, program, dan kegiatan seperti apa yang harus dikembangkan untuk mengefektifkan konsep revolusi mental.

PASANG SURUT PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pembangunan karakter dengan dinamika pasang surutnya telah dilaksanakan sejak Negeri ini Merdeka. Presiden Soekarno memberikan kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki prinsip berbeda dari mainstream dua kutub ideologi perang dingin saat itu. Di masa orde baru, terlepas dari berbagai korupsi yang terjadi, masa itu berhasil mendorong masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai budaya yang baik dan diikuti masyarakat saat itu, salah satu contohnya adalah gotong royong. Pada masa ini juga, pembangunan karakter didukung kelembagaan

yang kuat dalam BP7. Di samping itu Gerakan Pramuka kala itu menjalani masa keemasannya dengan berbagai dukungan Pemerintah yang begitu besar.

Di masa reformasi, pembangunan karakter seolah menjadi limbung. Ekses reformasi terhadap pembangunan karakter begitu besar. Meskipun begitu Pemerintah era reformasi tetap mencoba membangun kembali karakter bangsa. Sebut saja reformasi birokrasi, dan penguatan upaya pemberantasan korupsi. Namun sayangnya konsepsi pembangunan karakter yang belum begitu matang adalah persoalan besar yang dihadapi.

Semangat Presiden Jokowi dengan revolusi mentalnya adalah antusiasme yang harus ditangkap oleh seluruh pihak dengan baik, dan menindaklanjutinya dengan langkah nyata dalam bentuk kebijakan program, dan kegiatan. Dan revolusi mental sangat urgen untuk dilaksanakan, mengingat fakta degradasi moral dan karakter bangsa, dan urgensi tentang tuntutan internasional dalam MEA 2015.

PROPAGANDA REVOLUSI MENTAL

Revolusi mental adalah upaya secara cepat untuk mengubah budaya, paradigma dan mindset masyarakat untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, strategi yang

sebaiknya dikembangkan adalah strategi perubahan budaya, yang tentunya diawali melalui kampanye secara besar-besaran.

Kampanye itu haruslah disusun secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan, dan bukan kampanye dalam arti penyebaran informasi secara cetek melalui tayangan layanan masyarakat atau spanduk semata. Meskipun model seperti itu sebenarnya diperlukan dalam tahap awal kampanye.

Kampanye lanjutannya adalah tindakan nyata yang bisa membuat

dilakukan untuk memperluas hegemoni pada era perang dingin. Propaganda juga dilakukan oleh Korea Utara untuk membangun kebencian rakyatnya terhadap dunia barat. Propaganda dilakukan Korea Selatan untuk memacu rakyatnya mengejar ketertinggalannya dari Jepang. Mungkin sekarang saatnya Indonesia melaksanakan propaganda revolusi mental dengan isunya sendiri.

Negeri ini pernah berhasil melaksanakan perubahan mindset melalui program KB. Oleh karena

dan tanggung jawab pihak-pihak terkait termasuk media massa sebagai lembaga paling strategis. Terkait dengan aspek kelembagaan, dengan menyebarnya program dan kegiatan yang terkait revolusi mental maka diperlukan koordinasi yang bagus. Dan dengan gambaran besarnya kerja propaganda revolusi mental, maka perlu dipertimbangkan adanya lembaga khusus yang menangani propaganda revolusi mental yang memiliki kewenangan teknis hingga menyentuh pada lapisan terbawah masyarakat, di desa-desa, di lereng



REVOLUSI MENTAL UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

masyarakat tersentuh. Bagaimana menciptakan musuh bersama, yang harus dilawan dengan bangkitnya nasionalisme. Bagaimana menciptakan isu-isu yang dapat memancing bangkitnya kesadaran nasional. Bagaimana menciptakan kondisi yang menyadarkan bahwa negara kita memang tertinggal dan kewajiban bersamalah untuk mengejar ketertinggalan itu dengan bersikap disiplin, pantang menyerah, dan beretos kerja yang tinggi. Peran media massa menjadi sangat penting dalam tahap ini.

Kampanye seperti ini sering disebut sebagai propaganda. Propaganda seringkali didefinisikan sebagai suatu himpunan atau program untuk menyebarkan suatu doktrin. Propaganda pernah

itu perlu juga dipertimbangkan pengalaman yang tersebut. Keberhasilan program KB yang mendapat apresiasi internasional, bisa dijadikan referensi upaya perubahan mindset.

PENGUATAN INSTRUMEN PENDUKUNG

Untuk membangun upaya yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan dalam melaksanakan revolusi mental, diperlukan suatu sistem pendukung yang kuat, dalam aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek dukungan anggaran, dan aspek manajemen pelaksanaan. Dari aspek legal, Pemerintah perlu menyiapkan dasar hukum yang mumpuni dan holistik serta aplikabel. Dasar hukum ini diperlukan untuk mengatur peran

pegunungan hingga di pulau-pulau terpencil.

Pada aspek anggaran, di APBNP 2015 secara khusus Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk revolusi mental. Sedangkan dalam aspek manajemen pelaksanaan, perlu disusun *roadmap* revolusi mental yang didalamnya lengkap dengan tahapan pelaksanaan, indikator capaian, dan pembagian tugas secara proporsional. Dengan begitu, semangat kita untuk merevolusi mental agar terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas dan berkarakter dapat terwujud.

** Alumnus Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia*

UPAYA SIDOARJO TURUNKAN AKI

Kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan bayi semakin meningkat. Hasilnya AKI dan AKB di Sidoarjo pun alami penurunan yang signifikan.



25,316 per 1000 kelahiran hidup atau terjadi penurunan sebesar 42% lebih.

Pelaksanaan program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angkat Kematian Bayi (AKB) di Kab Sidoarjo melibatkan

akan didapat bidan yang terampil dan siap dalam menghadapi persalinan dengan segala kendalanya

Di dalam pelayanan kebidanan diharapkan bahwa setiap kehamilan dapat berakhir dengan keadaan ibu dan bayi yang selamat dan sehat. Sehingga kematian ibu dan bayi dapat dicegah atau paling tidak dapat di tekan angka kejadiannya. Sebab salah satu tolok ukur kemajuan pelayanan kebidanan bahkan sebagai gambaran tingkat sosial ekonomi dan budaya adalah kematian ibu (AKI).

Kebijakan penguatan Puskesmas dan Pustu ini di bidang kesehatan kabupaten Sidoarjo juga dilakukan penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana 26 Puskesmas dan 57 Puskesmas Pembantu (Pustu). Untuk Puskesmas Medaeng dan Tulangan telah diadakan peningkatan pelayanan dari layanan rawat jalan menjadi rawat inap.

Melalui persiapan sarana dan prasarana, diharapkan masyarakat lebih tahu mengenai kebutuhan kesehatan. Selain itu juga harus mengenal bagaimana atau cara-cara penyelesaian permasalahan kesehatan. Sehingga pada akhirnya, kesadaran masyarakat akan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi semakin meningkat. **(dbs)**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bekerja keras dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 96.27/100.000 KH (29 ibu). Pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 26 ibu atau 72,82 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 21 ibu atau 25,316 per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2012 sebesar 10.39/1000 KH (313 bayi). Pada tahun 2013 turun menjadi sebesar 313 bayi atau sebesar 8,77 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan sampai dengan Bulan September 2014 tercatat sebesar 180 bayi atau

segenap stakeholder yang ada. Dalam menjalankan program tidak hanya dilakukan Dinas Kesehatan saja. Namun juga didukung SKPD yang lain. Kebijakan yang diterapkan diawali dengan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

Selain itu, sarana dan prasarana dalam menunjang penurunan angka kematian ibu dan bayi juga di cukupi. Secara teknis bentuknya berupa intervensi prioritas demi mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan balita.

Ketersediaan tenaga medis sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada ibu hamil, proses persalinan dan pasca kelahiran juga menjadi perhatian utama. Semua bidan di Sidoarjo harus memiliki sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN). Lewat pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut,

GOVERNMENT MOBILE ALA GORONTALO

Pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Di Kabupaten Gorontalo ini bukan sekedar wacana sebab melalui Government Mobile pelayanan dilakukan hingga ke pelosok.



Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil membuat pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat terobosan dengan mendekatkan pelayanan. Masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke Limboto, ibu kota Kabupaten Gorontalo jika akan mengurus sesuatu. Justru para petugas yang langsung mendatangi masyarakat hingga ke pelosok.

Inovasi government mobile atau pemerintahan berjalan yang dicetuskan Bupati Gorontalo, David Bobihoe itu telah memberikan manfaat yang sangat besar. Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan sebab Sang Bupati rutin memboyong seluruh kepala dinas untuk membuka kantor di kecamatan, kelurahan/desa, atau rumah warga. Semua peralatan kerja, peralatan tidur, hingga peralatan mandi juga dibawa dari Limboto, Sehingga warga

yang menjadi tuan rumah tidak boleh kerepotan gara-gara David dan jajarannya berkantor di sana.

Government mobile, menurut David, dicetuskan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat lebih bisa terserap dengan baik ketika pemkab datang. Prinsip yang diterapkan yakni tuntas anggaran, tuntas program, dan tuntas masalah.

Menurutnya, dengan semakin sering bertemu dan mendengarkan keluhan masyarakat, jajarannya akan semakin peka. Hasil serap aspirasi melalui government mobile itu juga membantu pemkab dalam menyusun APBD.

Selain government mobile, program yang tak kalah inovatif adalah klinik pelayanan publik (KPP). Bupati menggandeng para kepala dinas dan mengagendakan hari-hari khusus untuk melayani masyarakat yang modelnya seperti *open house*. Dengan program itu, masyarakat

dipersilakan mengadukan berbagai persoalan setiap pekan.

Posisi desa dicanangkan sebagai laboratorium pemerintahan. Setiap desa dituntut untuk berinovasi. Bupati memberikan kewenangan mutlak kepada desa-desa tersebut untuk mengembangkan kreasi dalam melayani masyarakat.

Inovasi pelayanan publik 'Government Mobile' ini oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bahkan sertifikatnya pun telah diserahkan Deputy Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM kepada Bupati David Bobihoe dalam momentum Government Mobile Jilid III di kecamatan Tibawa Oktober tahun lalu.

Upaya pendaftaran hak cipta ini sebagai bentuk penghargaan atas kinerja aparat di Kabupaten Gorontalo dan sekaligus menghilangkan image 'terbengkalainya' pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Dalam program Government Mobile prinsipnya dalam hal pelayanan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkeinginan menjemput bola dengan menyajikan pelayanan langsung dihadapan masyarakat di setiap kecamatan.

Kesuksesan dan maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo pun telah menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang ingin meningkatkan pelayanan publik. Ini terlihat semakin banyaknya kunjungan studi banding terhadap pelaksanaan Government Mobile. (dbs)



NGALOKAT CAI, NGALOKAT DIRI, CARA WARGA MERAWAT SITU CIBURUY

Masyarakat Ciburuy, Padalarang, Bandung Barat mempunyai cara tersendiri untuk merawat lingkungan, khususnya Situ Ciburuy. Dengan melepas ikan, menanam pohon, mereka juga merayakannya dengan berkesenian dan menunjukan kekayaan kuliner serta kerajinan lokal.

Layaknya danau atau situ lainnya di wilayah Indonesia, khususnya yang berada dekat perkotaan, Situ Ciburuy pun tercemar dengan limbah industri dan rumah tangga sekitarnya. Termasuk dengan ekspansi pedagang yang mendirikan warung pada bantaránnya. Situ Ciburuy memang masih menjadi primadona kala itu. Namun karena banyaknya limbah dan warung yang merusak tatanan artistik juga cara berjualan agak nakal membuat banyak pengunjung enggan menyambangi Situ yang terletak di Kabupaten Bandung Barat tersebut.

Menyadari hal tersebut, di 2003, pemuda dan tokoh masyarakat Ciburuy membentuk wadah Asosiasi

Peduli Ciburuy (Aspec) yang kemudian berganti nama menjadi Paguyuban Pangheuyeuk Raksa Situ Ciburuy (Paparasi) yang tujuannya untuk menyelamatkan dan mengembalikan keasrian Ciburuy. Paparasi lantas menjalin kerjasama Paguyuban Seniman dan Budayawan (Pasebban) Kabupaten Bandung menyelenggarakan perhelatan budaya yang bertema 'Ngalokat Cai, Ngalokat Diri' (Membersihkan air dan membersihkan diri) di Situ Ciburuy untuk pertama kalinya.

Tak disangka, pagelaran itu direspon dengan sangat baik oleh Disbudpar Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Hingga kini, pagelaran budaya itu telah lima kali digelar. Dan, gelaran Ngalokat Cai, Ngalokat Diri pun mulai

menyentuh pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten. Hasilnya, penataan, pembangunan dan revitalisasi Situ Ciburuy mulai dilakukan. Hal ini dimulai dengan pengerukan, penataan jongko (warung) serta pembangunan panggung pertunjukkan, pemagaran, pembuatan taman, gapura juga kantor Touris Information Centre (TIC) di sebelah timur lahan parkir kawasan Situ Ciburuy.

Nah, Ngalokat Cai, Ngalokat Diri pada tahun ini (2015) bertajuk 'Kidung Si Layung dibawah Sinar Lembayung' yakni Hajat Rakyat 'Dari Rakyat untuk Rakyat' dalam rangka 'Menyatukan Hati, Menyatukan Diri.' Ajang ini diharapkan memberikan dampak positif yang juga memberikan nilai edukatif dan membuka ruang publik kepada semua lapisan masyarakat. Maksudnya agar semua kembali peduli terhadap jati diri budaya serta lingkungan sekitar.

Pagelaran budaya ini pun merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orangtua terdahulu Ciburuy yang sudah membuka ruang hidup dan publik, berupa telaga/ danau/ situ sebagai resapan air. Masyarakat setempat sangat meyakini, telaga/ danau/ situ Ciburuy selain sebagai wadah air, juga tempat mencari nafkah, media berekspresi bagi seniman. Singkat kata, semua anak cucu Ciburuy harus bisa menikmati dan memanfaatkan Situ Ciburuy. Ujungnya apalagi kalau bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Situ yang dibangun sejak jaman kolonial ini menjadi destinasi wisata.

Melengkapi hajat ini berbagai kesenian tradisional khas masyarakat Situ Ciburuy, seperti arak-arakan (helaran)-pawai delman, pintonan ibing ketuk tilu, jaipongan, ibing klasik dan musik awi digelar. Termasuk calung grup gumasep, pojok si cepot, ki daus, pantomim septian, dialog menyatukan hati, menyatukan diri, penanaman pohon dan ikan, pameran kuliner, batu akik, patung boneks, kerajinan, baju payet dan sebagainya. Menurut Nana Munajat S.Sen, tokoh Ciburuy yang juga penggagas Paparasi, pihaknya bermaksud mengangkat kembali pamor Situ Ciburuy yang kian hari kian menurun melalui Ngalokat Cai, Ngalokat Diri atau yang dikenal



dengan Hajat Situ Ciburuy. "Kami ingin mengangkat kembali komara Situ Ciburuy, seperti sediaan kala saat jaman Kolonial," cetusnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut keterlibatan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten pun menjadi penting. Sebagai dukungan,

pada gelaran Hajat Situ Ciburuy kali ini, hadir Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Hazwan Yunaz dan Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Wahnarno Hadi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Sementara dari Kabupaten Bandung Barat juga hadir Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra.

Upaya menjadikan Situ Ciburuy sebagai tujuan wisata memang sejalan dengan niat pemerintah. Pemkab Bandung Barat misalnya menginginkan pengelolaan Situ Ciburuy secara menyeluruh guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Ini disebabkan PAD yang diperoleh dari objek wisata yang terletak di Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, itu masih belum optimal. Pihak Pemkab menginginkan pengelolaan air dan kepemilikan lahan di Situ Ciburuy diambil alih. Dengan demikian, Pemkab Bandung Barat bisa melakukan berbagai program. Agar Situ Ciburuy bisa menjadi objek wisata yang menarik, menurut Wabup, diperlukan anggaran yang cukup besar. Mulai dari penataan, pengelolaan hingga promosi pemasaran. "Tentunya harus ada modal besar. Saat ini Pemkab sedang memperhitungkannya," pungkasnya. **PS**

SITU CIBURUY DI MASA KEEMASAN

Situ Ciburuy dibangun Belanda sebagai resapan air dan kepentingan militernya. Belanda begitu menjaga ekosistem situ yang terletak di desa Ciburuy, Padalarang, Bandung Barat. Kekayaan flora dan fauna pun begitu beragam. Dengan begitu mendatangkan kesejahteraan tersendiri bagi masyarakat sekitar.



Jika hari ini kita menyaksikan Situ Ciburuy tengah menghadapi masalah dengan pendangkalan, penyempitan lahan serta serbuan sampah dan limbah lain halnya kalau menyaksikannya di era kolonial sampai tahun 1980-an. Dimasa itu Situ Ciburuy berada pada masa keemasannya membagi penghidupan kepada warga sekitar.

Sebuah catatan hasil rekaman dari sesepuh Desa Ciburuy mengungkapkan Situ Ciburuy sangat erat kaitannya dengan sejarah pembentukan pemerintahan kota (gemeente) Bandung dan Kabupaten Bandung pada tahun 1906. Layaknya negeri asalnya, dalam membangun kota, Belanda kerap mendirikan kanal atau sungai serta telaga/ danau/ situ. Situ Ciburuy adalah satu dari sepuluh Situ yang dibangun Belanda ketika itu.

Tujuannya untuk resapan air, persediaan air saat kemarau sekaligus pencegah banjir di musim penghujan. Situ Ciburuy sendiri juga

dipergunakan untuk kepentingan militer, khususnya Detasemen Kavaleri. Saat kali pertama dibangun, Situ ini memiliki luas 92 hektar dan memiliki sebuah pulau bernama 'bobojong' seluas 1 hektar. Sebagai sumber air, Situ ini mengandalkan dari mata air Cimeta, yakni hulu Citarum Purba yang berada di wilayah kecamatan Ngamprah. Sementara di sebelah utara-timur Situ Ciburuy, lebih kurang 6 km dari mata air Cimeta didirikan irigasi dengan 11 pintu air.

Tak hanya itu, dipinggiran Situ juga ditanami berbagai bunga yang diantaranya, kembang kertas, pakis haji, kembang sepatu, kaso, serta pohon besar macam beringin dan kiara payung. Dengan aneka flora itu, burung-burung liar seperti bangau, bondol, kutilang hingga wallet menyambangi telaga. Sementara ikan-ikan dari Cimeta pun menjadi penghuni Situ semisal lele, gabus, benteur, betook, nila, ikan mas, hingga belut.

Flora dan fauna itu semakin betah di Situ Ciburuy setelah tokoh masyarakat, Haji Lomri diangkat Belanda untuk menjaga Situ itu. Haji Lomri bersama masyarakat kemudian mengadakan siskamling untuk Situ Ciburuy setiap harinya. Dengan cara itu tak ada orang yang berani mengail, menjala dan mengganggu fauna dan flora di Situ Ciburuy. Selain itu juga diterapkan kearifan lokal seperti pamali dan lainnya. Bahkan, mitos tentang lulun samak, munding dongkol dan silayung pun sengaja dihembuskan untuk mencegah orang mengotori air dan flora fauna setempat.

Meski begitu, bukan berarti masyarakat tidak bisa mendapatkan hasil dari Situ Ciburuy. Setiap tahun sekali, masyarakat bisa memanen ikan saat diselenggarakan hajatan cai. Keberadaan situ itu juga bisa mengairi persawahan masyarakat dan empang-empang. Singkat kata, Situ Ciburuy mampu menggeliatkan ekonomi setempat dengan kehidupan agrarisnya. Hingga medio 1980an, Situ ini masih cukup menawan dan mengundang banyak wisatawan domestik. Sayang di atas tahun 1985, Situ menjadi tak terurus dengan banyaknya bangunan liar di seputar Situ. Pintu-pintu airnya yang tak berfungsi membuat air dari Cimeta tertahan, limbah industri dan rumah tangga juga menghiasi Situ hingga kini. **PS**



MENIKMATI SENSASI JERAM DI *Citarik*

Musim liburan sebentar lagi datang, banyak pilihan tempat untuk menghabiskan waktu liburan. Namun bagi anda yang hobi kegiatan outdoor yang memacu adrenalin seperti rafting adalah salah satu pilihan yang cukup menantang. Dan untuk menikmati spot rafting yang relatif dekat dengan Jakarta, daerah Sukabumi adalah pilihannya.



Sukabumi terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, dengan ketinggian 584 meter dpl, dan suhu udara maksimum 29 derajat celsius. Untuk datang ke sejumlah tempat wisata Sukabumi, Anda harus menempuh perjalanan sejauh 120 km jika Anda dari Jakarta. Dari Bandung, jarak perjalanan ke Sukabumi adalah sejauh 96 km.

Pesona tempat wisata di Sukabumi juga ada pada sebuah cagar budayanya yang terkenal, yakni Kampung Ciptagelar, sebuah kampung adat dengan tradisi masyarakat yang masih dipertahankan hingga kini. Jika Anda ingin mencari kuliner Sukabumi, maka beberapa jenis makanan yang menarik antara lain adalah mochi, bubur ayam sukabumi, surabi, dan sebagainya.

Keindahan destinasi wisata Sukabumi juga terletak pada wisata alamnya yang menawan. Topografi wilayah Sukabumi yang dikelilingi pegunungan membuat udara di daerah tersebut begitu segar dengan cuaca yang sejuk, inilah salah satu factor yang membuat destinasi wisata di Jawa Barat ini menarik, belum lagi potensi sungai yang meliuk-liuk seperti Citatih dan Citarik yang sangat cocok dijadikan arena rafting.

Sungai Citarik dipilih karena relatif dekat dengan Jakarta dan merupakan tempat tujuan wisata alternatif. Diperkirakan perjalanan dari Jakarta-Citarik memakan waktu kurang lebih 4 jam. Apabila pukul 07.30 mulai berangkat dari Jakarta kemungkinan sekitar jam 12.00 sudah sampai, itupun kalau kondisi jalan lancar.

Sepanjang perjalanan, saya tidur cukup lelap, maklumlah semalam kurang tidur karena terus memikirkan 'keganasan arus Citarik'. Dipertigaan Ciawai saya sudah terbangun dari tidur. Seperti biasa pada waktu weekend jalan menuju arah Sukabumi macet, dan saya tertidur lagi. Dipertigaan Cibadak-Cikidang saya kembali terbangun. Suasana pemandangan sudah mulai menghijau. Jalan yang meliuk-liuk, landscape pegunungan, hamparan hutan, perkebunan teh, serta perkebunan sawit merupakan pertanda bahwa tidak lama lagi kami akan tiba di Cikidang.

Benar saja tepat pukul 12.30 saya tiba di Caldera River Resort, salah satu operator penyelenggara rafting sungai Citarik. Sejatinnya di Citarik ada 5 operator penyelenggara rafting, namun saat ini hanya tersisa 3 operator, yaitu Caldera, Arus Liar dan Kaki Langit.

Sesampainya di lokasi kami langsung disuguhkan makan siang dengan menu lalapan plus sambel, sayur asem, tempe dan tahu goreng serta ayam goreng..em..menunya Sunda banget batinku. Dan pastinya sangat cocok dengan lingkungan dan cuacanya. Setelah makan siang kami langsung briefing dan pembagian grup. Setelah pembagian grup, kami beramah-tamah dengan semua peserta dan panitia melalui sebuah permainan ringan. Ramah-tamah kemudian dilanjutkan setelah makan malam dengan bernyanyi bersama, performa art, barbeque, dan pembakaran api unggu.

WAS-WAS

Pukul 07.30 panitia (operator rafting) mulai mengumpulkan kami untuk melakukan persiapan rafting. Didahului dengan pendataan peserta yang akan ikut rafting, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan. Dari wajah-wajah peserta rafting tampak keriangannya sekaligus rasa was-was, terutama yang baru pertama kali melakukan rafting. Termasuk saya sebagai pemula.

Kami sudah bersiap untuk menelusuri arus Citarik yang kabarnya memiliki energi untuk menarik. Tim dibagi dalam beberapa kelompok

dengan jumlah per kelompok terdiri dari 5 orang plus 1 orang instruktur. Pastinya ada perasaan takut serta was-was dihati kami, tapi instruktur meyakinkan kami bahwa standar keselamatan yang diterapkan Caldera sudah memenuhi standar. Sesuai dengan Standar Operating System (SOP) setiap peserta wajib memakai baju pelampung dan helm. Setelah itu dilanjutkan penjelasan atau instruksi singkat mengenai cara mengendalikan perahu.

Bagi mereka yang baru pertama kali rafting atau berarum jeram perasaan was-was itu pasti menyelinap. Mereka takut menghadapi kemungkinan terlempar dari perahu yang diombang ambingkan arus. Karena itu pengarang jeram dituntut selalu waspada untuk siap menerima situasi yang tak terduga.

Sebelum masuk perahu para rafter pemula kemudian briefing oleh skipper atau instruktur. Dalam briefing tersebut para rafter diharapkan tetap waspada dan mengikuti aturan. Namun, sebenarnya setelah mengarungi jeram-jeram sungai deras di atas perahu karet itu tidaklah seseram yang dibayangkan. Bahkan muncul keinginan untuk mengulang kembali nikmatnya berarung jeram.

Ada beberapa istilah atau perintah dari skipper yang harus di taati, seperti; kata Dancing, artinya goyang-goyangin perahu kalau perahunya stuck diantara batu-batu. Boom, nunduk dengan posisi tangan yang memegang ujung kayuh berada didasar perahu, ini gunanya supaya tidak terlempar dari perahu ketika akan bertabrakan keras dengan batu atau perahu lainnya serta untuk menghindari ranting-ranting pohon. Kiri / Kanan, kita harus pindah posisi ke posisi teman yang ada disamping kita, gunanya buat ngerubah arah perahu dan biasanya perintah ini dibarengin sama perintah "Dancing".. goyang teruss. Maju, mengayuh ke

depan. Mundur, mengayuh mundur ke belakang. Serta Stop, untuk berhenti mendayung.

MENAKLUKAN CITARIK

Kini saatnya berpetualang menelusuri dan menaklukan liarnya arus citarik. perasaan saya sudah diliputi was-was dan cemas. Benar saja, baru beberapa meter perjalanan jeram sungai citarik sudah membuat adrenalin naik tajam. Ditambah teriakan dari peserta lainnya semakin membuat adrenalin meningkat tajam. Namun, beberapa meter kemudian riam semakin tenang, gemeric air juga terdengar tenang membuat hati tenang dan damai.

Sepanjang 9 kilometer pengarungan sungai Citarik, kami menemukan sejumlah jeram yang nama-namanya sudah cukup dikenal. Jeram-jeram itu diberi nama berdasarkan kejadian yang pernah dialami di tempat itu. Jeram pertama adalah "Jeram TVRI". Kenapa dinamakan demikian, karena di jeram inilah seorang kameramen TVRI yang sedang berarung jeram sempat jatuh pingsan.

Tidak jauh dari "Jeram TVRI", ada "Jeram Golden Gate". Di sebelah kiri dan kanan jeram ini terdapat dua buah batu besar menyerupai gerbang atau "gate". Untuk melintas jeram yang berada di tengahnya cukup sulit lantaran ruang yang tersedia sangat sempit. Kabarinya, tidak sedikit perahu yang hampir terbalik di sini. Di kalangan juru mudi, yang dengan lancar membawa tamu melintas jeram ini diberi "poin emas".

Jeram berikutnya adalah "Jeram Zig-zag". Kondisi jeram di sini mengharuskan jurumudi harus mengendalikan perahunya dengan cara "zig-zag". Biasanya, saat melewati jeram ini jurumudi akan membuat atraksi perahu "dipentokkan" ke batu.

Ada pula "Jeram Jumping Jack Flash". Di masa awal pengarungan Sungai Citarik, perahu yang melewati

jeram ini, juru mudinya selalu terlempar atau "jumping" ke arah depan melewati perahu. Dari kejadian itu, setiap jurumudi pasti akan masuk ke perahu atau berpegangan kencang kalau melewati jeram ini. Dan tidak sedikit peserta maupun instruktur yang terlempar ke dalam sungi. Setelah itu, baru "Jeram Walk Away", tempat dimana perahu kami sempat stuck di batu.

Tak kalah seru, jeram yang akan kami lewati setelah itu adalah "Jeram Big Z" dan "Jeram Panjang". Jeram Big Z, karena bentuk alur sungainya seperti huruf "Z" berukuran besar. Karena bentuknya seperti huruf Z itulah, pada saat menikung di jeram ini, perahu selalu terbentur dinding-dinding batuan yang berada di tepi sungai.

TAK TEREKSPOS

Sebenarnya, selain keliaran dan keganasan arus Citarik, ada pesona yang tidak terekspos oleh indra kita, yaitu suasana sekeliling pinggir sungai. Melihat keindahan tebing-tebing yang ditumbuhi pepohonan bambu dan pohon-pohon besar. Di sungai ini kita bisa melihat biawak berenang dan bahkan ada yang sedang berjemur di atas batu yang berlumut. Tidak jarang kita juga bisa menyaksikan penduduk sekitar mencuci pakaian.

Kepakan sayap dan kicauan burung-burung semakin menambah eksotik sungai Citarik. Belum lagi suara-suara hewan liar lainnya yang dipadu dengan suara gemuruh riak air, semakin menambah harmoni alam Citarik. Sayang, para rafter jarang memperhatikannya karena asyik dengan sensasi keganasan Citarik.

Selesai menaklukan sensasi jeram Citarik, kami langsung disuguhkan sensasi kesegaran tiada duanya, ya sebuah kelapa muda hijau yang baru dipetik telah menanti untuk diteguk dan disantap, emh..betapa segarnya, sensasi yang sulit untuk dilupakan.

(DAM)

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH
PEMERINTAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota. Untuk, sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : Melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:



1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,-(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

KEDUA : Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

KELIMA :

1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional

serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM : Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

KETUJUH : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;

2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

KEDELEPAN : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO

PASAR LOAK DI TENGAH HUNIAN ELITE

Komunitas Pluit dan sekitarnya merupakan wilayah hunian kaum elite. Segala kebutuhan disediakan oleh banyaknya ruko maupun supermarket yang berdiri. Daya beli masyarakat yang tinggi memang ikut mendorong faktor tersebut.

Eksklusivitas dan keamanan menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk belanja

di tempat tertentu, seperti ruko, supermarket maupun mall. Hingga pasar tradisional pun kini mulai banyak ditinggalkan. Pedagang yang menjual barang kelontong kini lebih banyak “jemput bola,” tidak menunggu pembeli datang di kiosnya. Caranya mereka langsung menjajakan dagangannya dengan berkeliling ke pemukiman - pemukiman warga, yang mayoritas tionghoa.

Bagi anda yang sering melintasi jalan Pluit Selatan Raya mungkin akan menampik kesan seperti di atas. Wilayah tersebut memang pengecualian, bagaimana tidak, di tempat itu berdiri lapak - lapak pedagang loakkan. Suatu jenis produk yang mungkin tidak pernah dilirik oleh orang yang berduit. Biasanya orang berkantong tebal lebih memilih produk baru dibandingkan yang bekas.



Siang itu misalnya, puluhan orang berkendara motor memakirkan kendaraannya di pinggir jalan, untuk sekedar melihat - lihat barang dagangan. Para pedagang umumnya menjajakan berbagai jenis benda, dari mulai jam dinding, lampu hias, kulkas, radio, T.V, hingga kloset bekas. Bagi pengunjung pasar loak, jika ada yang dirasa menarik atau dibutuhkan barulah membeli. Pembeliannya pun melalui proses tawar menawar.

Perihal hanya orang kecil yang mengunjungi tempat ini dibantah oleh salah satu pedagang bernama Ayumi. "Jangan salah mas, orang - orang kaya juga banyak yang mencari barang - barang loakkan," tuturnya. Uniknnya ia memperoleh



Foto: Xinhuanet.com

barang dagangan juga dari orang kaya tersebut. "Prinsipnya dari dia untuk dia juga," cetus ayumi sambil tersenyum.

Ditambahkan Ayumi, ia memperoleh barang dagangan dari pemukiman sekitar. "Biasanya ada warga sekitar yang menjual barang, mereka datang langsung ke sini," ujarnya. Identiknya pasar loak dengan barang haram juga di enyahkan Ayumi. Umumnya warga menjual karena kebutuhan, entah itu untuk ekonomi maupun ingin mengganti dengan barang baru.

"Kami nggak bakal berani menjual barang seperti itu, karena selama ini antara pedagang pasar dengan pihak kepolisian terjalin suatu persahabatan," ucap bapak satu anak ini. Bahkan dikatakannya ia kerap menerima barang - barang elektronik besar seperti kulkas, mesin, lemari atau televisi. Kalau itu barang curian, menurutnya orang yang membawa pasti sudah 'habis.'

Berbelanja di pasar loak seluas 20 x 30 m ini menurut Ayumi sangat menguntungkan, sebab barang yang dijualnya harganya murah. Disamping itu kalau beruntung kita dapat memperoleh barang dengan kualitas bagus. Sebab barang yang dijualnya terkadang merupakan barang mahal.

Pria asal Serang ini menceritakan bahwa sebelumnya ia berdagang pakaian sisa ekspor di Pasar Senen.

Namun roda nasib membawanya terdampar di Pluit Selatan.

"Semenjak pakaian bekas impor dari luar negeri ramai di pasaran, bos kami yang pengusaha garmen ikut terkena dampaknya," tandasnya. Ayumi pun mengaku ia baru berdagang loakkan selama 1 tahun. "Membuka usaha ini relatif kecil modalnya dibanding harus berdagang pakaian sisa ekspor," kata pria berusia 35 tahun ini.

Ia mencontohkan bahwa kadang ada pelanggan yang menitipkan barang untuk dijualkan. "Tapi tak selamanya seperti itu, saya juga sering membeli barang setelah itu baru dijual kembali," tambahnya. Selain orang yang menjual, Ayumi juga sering dimintai pesanan untuk mencari barang tertentu. Untuk itu bisnisnya lebih mengedepankan komunikasi, artinya telinga dan omongan harus tetap aktif.

Di Pasar yang mulai ramai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Ayumi memulai aktivitasnya setiap pukul 07.00 hingga 18.00 WIB. Ditanya sukanya, ia senang jika memperoleh untung besar, sebaliknya saat dagangan tidak laku dan perburuan atas barang pesanan orang tidak didapat itu adalah duka. Menurutnya itu adalah seni dalam berdagang, yang penting adalah kesabaran. **PS**



Foto: Xinhuanet.com

WEF-EA: Indonesia Unjuk Gigi

Indonesia bertekad akan mempertahankan label 'Dekade Emas' miliknya. Investor terus diundang, layanan dipermudah. Bila perlu, telpon langsung Pak Presiden!



Founder and Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab, memberikan label bahwa Indonesia telah mengalami 'Dekade Emas' pada gelaran WEF-EA tahun lalu di Manila, Filipina. Sejak saat

itu pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan label 'Dekade Emas' itu pada era pemerintahan baru Presiden Jokowi.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, dalam sambutannya pada "Indonesia Lunch" sebagai rangkaian

acara World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) 2015, di Jakarta, medio April lalu, menegaskan bahwa pemerintah bertekad mewujudkan 'Dekade Emas' kedua bagi Indonesia melalui kekuatan peningkatan ekonomi dan perdagangan.

Dengan seluruh potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dinamika demokrasi, dan semangat reformasi Indonesia, pemerintah sangat yakin 'Dekade Emas kedua itu dapat diwujudkan.

"Perdagangan merupakan bagian penting dari kemajuan Indonesia dan perwujudan dekade-dekade emas ke depan. Oleh karenanya, kami bertekad untuk meningkatkan ekspor 300 persen dalam lima tahun ke depan. Hal ini pula yang menjadi pusat perhatian Presiden Joko Widodo dalam setiap lawatannya," papar Mendag.

Dengan semboyan 'kerja, kerja, kerja', Rachmat menyadari bahwa perdagangan menjadi bagian penting bagi perkembangan Indonesia. Kebijakan ekonomi Indonesia akan berorientasi keluar dengan cara menggaet mitra-mitra baru dalam rangka meningkatkan perdagangan.

"Indonesia negara yang terbuka bagi dunia luar. Kebijakan ekonomi kita berorientasi keluar (*outward looking*) untuk mempercepat pembangunan, termasuk bagi kerja sama perdagangan."

Dalam sambutannya, Mendag mengapresiasi kepercayaan WEF kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah forum ini untuk ke-2 kalinya. Maka, kesempatan ini tentu dimanfaatkan Pemerintah untuk mendorong kepercayaan, bisnis, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Mendag mendorong penyusunan agenda regional dan global yang lebih konkret dan berharap kerja sama Pemerintah Indonesia dan WEF agar tidak berhenti pada pertemuan ini saja.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen ditargetkan tercapai dalam waktu tiga tahun, termasuk dengan pembangunan listrik sebesar 35.000 MW dan pembangunan satu juta rumah murah per tahun.



Sementara itu, menanggapi keraguan atas sikap pemerintah akan pentingnya kerja sama perdagangan, Indonesia tengah bersiap melanjutkan Free Trade Agreement (FTA) atas dasar perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan beberapa negara, termasuk Uni Eropa dan Korea Selatan. Selain itu dengan Amerika Serikat, Indonesia berkeinginan menyeimbangkan kerja sama dan kesepakatan kemitraan agar potensi yang masih luas ini dapat dimanfaatkan, serta agar Indonesia memiliki perdagangan yang lebih kuat dan dapat meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI).

"Penundaan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa yang sudah berlangsung selama dua tahun akan diproses kembali. Begitu juga dengan Korea Selatan, yang negosiasinya sempat terhenti tahun lalu, kembali akan dilanjutkan," tutur Mendag.

Penguatan lain yang dilakukan Mendag yaitu bekerja keras meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN yang saat ini mencapai 24,2 persen dari total perdagangan ASEAN. Perdagangan Indonesia dengan ASEAN saat ini cukup baik, yakni totalnya mencapai 25,6%. "Nilai ini masih bisa terus ditingkatkan.

Indonesia akan menjadi pendorong utama untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang terbuka, dinamis, dan saling terkoneksi. MEA secara resmi akan diberlakukan

pada 1 Januari 2016," tegas Mendag optimis.

Di dalam negeri, Kementerian Perdagangan menciptakan langkah-langkah kebijakan perdagangan secara simultan. Kemendag melakukan berbagai upaya untuk melakukan peningkatan nilai tambah dan pendekatan dasar untuk melindungi konsumen, termasuk mengenai moralitasnya.

Mendag memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah anti-impor, selama produk yang diimpor telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar barang-barang tetap tersedia dan sesuai dengan kualitas dan standar untuk pasar Indonesia. Produk impor harus tetap berkualitas dan bisa dikonsumsi orang Indonesia.

"Pasar dan konsumen di dalam negeri harus kita lindungi dari produk-produk berkualitas rendah dan produk impor ilegal. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga para investor sehingga mendapat jaminan untuk berinvestasi di Indonesia."

Pada 20 April 2015, Presiden Jokowi secara resmi membuka WEF-EA ke-24 di Jakarta. Presiden mempromosikan peluang bisnis dan investasi dengan menjanjikan berbagai kepastian perizinan investasi, serta membanggakan Indonesia dari segi kemampuan bertahan menghadapi berbagai macam krisis global. "Setelah seminggu bisa melihat peluang yang luar biasa di sini, silakan berinvestasi. Jika Anda menemui masalah, telepon saya," kata Presiden Jokowi.

WEF-EA tahun ini dihadiri 748 orang wakil dari Pemerintahan 40 Negara, 42 pemuka media, 180 CEO perusahaan terbesar dunia, dan 8 organisasi internasional. Banyaknya jumlah peserta menunjukkan tingginya minat para tokoh, pengusaha, dan pelaku dunia bisnis untuk berinvestasi di Indonesia. (IN)



'GOTONG ROYONG' BANTU INDONESIA

Kesuksesan Indonesia mengentaskan kemiskinan diapresiasi dengan baik oleh para donatur dunia dan PBB. Program yang sudah dijalankan, dipastikan berlanjut.

Para donatur terkemuka dunia pada pertengahan April lalu berkumpul untuk berdiskusi mengenai aksi berkelanjutan memerangi kemiskinan sambil mempromosikan aneka tujuan pembangunan berkelanjutan pascaMDGs. Pertemuan interaktif juga mengajak lembaga pembangunan dunia, UNDP dan Pemerintah Indonesia. Menko PMK, Puan Maharani mendapatkan kehormatan untuk membuka pertemuan bertajuk *"the Post-2015 Partnership Platform*

for Philanthropy" ini.

Saat ini lebih dari satu miliar jiwa dari total populasi dunia telah berhasil keluar dan terbebas dari jerat kemiskinan absolut berkat terpenuhinya sejumlah tujuan pembangunan millenium (MDGs) yang akan berakhir di tahun 2015 ini.

Untuk langkah berikutnya, program kerja sama dan donasi yang merupakan proyek milik UNDP, berbagai yayasan, dan sekelompok yayasan di bawah bimbingan *Rockefeller Philanthropy Advisors*

bertekad untuk membantu para donatur dunia dalam kiprah mereka untuk berperan aktif merencanakan dan menerapkan aneka tujuan pembangunan berkelanjutan global pascaMDGs.

Menko PMK dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap peluncuran program ini karena memang bersesuaian dengan semangat keseharian kehidupan bangsa Indonesia yaitu gotong royong atau semangat untuk saling membantu.

“Bangsa Indonesia itu percaya kalau kerja sama saling membantu akan mencapai tujuan bersama, kami mengenalnya dengan istilah ‘gotong royong.’ Jadi donatur itu sesungguhnya tidak hanya bermakna memberikan sumbangan kepada masyarakat tetapi juga bekerja sama membantu orang lain agar dapat mandiri terutama kepada mereka yang tidak beruntung.” Demikian sambutan Menko PMK.

Menurut Menko PMK, program-program yang dilaksanakan pemerintah salah satunya bertujuan untuk mengatasi tuntutan pembangunan manusia Indonesia. “Maka, saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif.”

Program-program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.

Program-program itu, merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.

“Yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawa Cita yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) III,” ujar Menko PMK lagi.

Indonesia, bersama dengan Kolombia, Ghana, dan Kenya, menjadi empat negara yang terpilih sebagai negara utama bagi program kerja sama dan donasi pascaMDGs yang sudah diluncurkan sejak November tahun lalu.



Indonesia terpilih karena diketahui telah mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi dan dipercaya akan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia di tahun 2030 nanti. Kendati demikian, sekitar 28 juta jiwa di Indonesia kini masih hidup dalam garis kemiskinan. Begitu juga dengan kesenjangan antara Si Kaya dan Si Miskin.

“Bagi Indonesia, keunggulan dan kesuksesan itu hanya dirasakan oleh kalangan menengah, padahal harus dipastikan bila kesuksesan itu harus menguntungkan semua orang terutama bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Kami sangat yakin kalau para donatur dan yayasan yang ada ini punya para ahli dan pengetahuan yang baik untuk memperbaiki kehidupan bagi 250 juta Masyarakat Indonesia,” kata Koordinator Residen Program PBB di Indonesia, Douglas Broderick.

Menurut UNDP, Indonesia telah sukses memberantas kemiskinan warganya yang telah hidup dalam kemiskinan absolut, memperbaiki ketidaksetaraan gender dalam pendidikan terutama angka putus sekolah dan buta huruf, mengendalikan penyebaran tuberkulosis, dan meningkatkan akses

warga terhadap pemanfaatan akses ponsel pintar.

Di sisi lain, UNDP menilai bahwa beberapa tujuan MDGs masih belum dapat dipenuhi Indonesia seperti menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian anak berusia di bawah lima tahun, menurunkan angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup, menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan meningkatkan akses terhadap air bersih serta sanitasi.

Untuk mendorong pertukaran pengetahuan global, Platform inisiatif ini akan memberikan portal website yaitu www.SDGfunders.org yang memuat data investasi filantropis yang tersedia secara bebas dan berfungsi sebagai arena diskusi dan berbagi informasi di seluruh dunia.

“Platform ini menyediakan kerangka kerja untuk kesuksesan kerja sama antara yayasan, LSM, dan pemerintah,” kata *President of Foundation Center*, Bradford K. Smith. “Informasi yang baik dan komunikasi yang terbuka akan menjadi bahan utama jika para mitra ingin membuat kemajuan yang berarti pada berbagai tujuan yang digariskan oleh SDGs.” (IN)

GN SPAK, AJAK PEREMPUAN TANGKAL KORUPSI

Peran penting perempuan sangat ditunggu ketika bangsa tengah berupaya melawan kejahatan akibat korupsi. Semuanya dapat dimulai dari rumah.



Berepatan dengan Peringatan Hari Kartini pada 21 April 2015 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencanangkan Gerakan Nasional “Saya Perempuan Anti Korupsi” (GN SPAK). Spanduk raksasa berukuran 17x14 meter menyelimuti salah satu sisi Gedung KPK sebagai tanda pencanangan kegiatan setelah sebelumnya dipasang oleh Tim Kartini Petualang.

Acara ini dihadiri oleh Ketua KPK Sementara Taufiequrachman

Ruki, mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Dalam sambutannya, Ruki mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak perempuan tangguh yang telah memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Sudah seharusnya, perjuangan itu dilanjutkan dengan membebaskan

Tanah Air dari belenggu korupsi.

“Karenanya, KPK memandang gerakan nasional ini menjadi penting untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sehingga lahir generasi antikorupsi di masa yang akan datang.”

Sementara itu, pencanangan GN SPAK dilakukan oleh Menko PMK, Puan Maharani, dengan melepaskan 200 balon ke udara. Puan menganalogikan peran perempuan ibarat separuh sayap seekor burung.

“Butuh kerja sama yang baik antara kedua sayap, lelaki dan perempuan, untuk mengepak dan terbang tinggi,” katanya.

Puan menilai, SPAK merupakan wujud kesetaraan gender yang menempatkan peran perempuan pada posisi yang tepat. Karenanya, Dia berharap kaum perempuan dapat mengorganisasikan diri dan mengembangkan kepemimpinan agar dapat berperan lebih optimal. “Saya turut bangga gerakan ini telah berjalan,” kata Ibu Menko lagi.

Gerakan Nasional SPAK memandang peran perempuan sangat penting dalam pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri maupun sebagai anggota masyarakat. Diharapkan, gerakan ini mampu memproduksi sebanyak mungkin para perempuan dan organisasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dengan melindungi diri dari korupsi dengan cara menyebarluaskan pengetahuan, modus-modus, dan peluang-peluang yang berpotensi korupsi serta konsekuensi hukumnya. Dengan pengaruh positif ini, para perempuan diharapkan menyebarkannya tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakatnya di manapun mereka berada.

Sebelumnya, program SPAK telah diluncurkan pada 22 April 2014. Program yang telah melatih perempuan Indonesia di 13 provinsi ini, telah melahirkan 200 fasilitator dari berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis.

Hingga Desember 2014, gerakan ini telah memberikan sosialisasi kepada hampir 20 ribu perempuan dengan sejumlah perubahan yang telah dicapai, antara lain; Membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli ketika pengurusan dokumen identitas hukum; Banyak

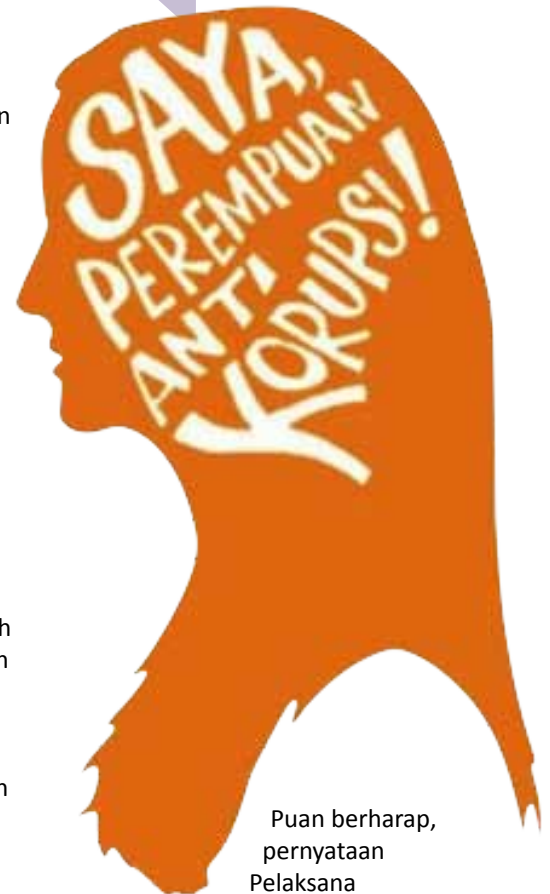
perempuan mulai kritis menanyakan asal uang yang diberikan oleh suaminya; Beberapa istri tidak lagi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas; Para ibu mulai secara serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga dan memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta masih banyak perubahan lainnya.

“Bagaimana kemudian mental bangsa ini diubah atau kemudian dijaga, karena itu berawal dari keluarga yang tentu mendidik di rumah itu dan secara kultural adalah ibu. Bagaimana kita membangkitkan atau menyadarkan keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita, harus ada budaya malu dalam melakukan suatu hal yang kemudian menyesatkan dan merugikan masyarakat,” papar Menko PMK.

Menko PMK menambahkan, dalam perjuangan emansipasi wanita yang dicetuskan RA Kartini, kaum perempuan bukan berlomba dengan kaum pria untuk menjadi yang mendominasi atau didominasi. Melainkan, kaum hawa dapat bersinergi dengan kaum adam untuk melakukan yang terbaik di bidangnya masing-masing dan terutama membangun karakter bangsa yang dimulai dari keluarga.

“Jadi, tentu saja penting sekali peran perempuan sebagai tiang negara, dan tentu saja kesinambungan dan juga partnership perempuan dan laki-laki. Bukan soal dominasi satu sama lain, tapi bagaimana kemudian hal itu bisa bersinergi dalam membuat suatu revolusi mental atau karakter building yang dimulai dari keluarga.”

Meski demikian, Puan masih menaruh harapan besar kepada para srikandi Indonesia untuk terus memberikan sumbangsih besar terhadap negeri ini, termasuk di bidang pemberantasan korupsi.



Puan berharap, pernyataan Pelaksana

Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, yakni perempuan bisa mengisi kursi pimpinan lembaga antirasuah jilid IV dapat terwujud.

Ruki menuturkan, kaum perempuan selalu menjadi bagian terpenting dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak era merebut kemerdekaan hingga kini, terdapat nama-nama perempuan Indonesia yang telah mengubah nasib jutaan orang bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dalam perjuangan pemberantasan korupsi saat ini, kaum perempuan tetap memiliki peran sentral.

Setidaknya di lingkungan keluarga, perempuan dapat mencegah korupsi dengan tidak terlalu banyak menuntut kaum pria untuk memberikan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. “Jangan terlalu banyak menuntut untuk memberikan sesuatu yang berada di luar kemampuannya,” kata Ruki lagi. (IN)

MENGADOPSI DYNAMIC GOVERNANCE, SEBUAH KEHARUSAN

Adopsi Dynamic Governance menjadi begitu penting bagi Indonesia demi tercapainya tercapainya reformasi birokrasi yang efektif. Lantas bagaimana mewujudkan hal tersebut?

Banyak pakar meyakini bahwa tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) mampu mendorong bangsa ini keluar dari sistem buruk tata kelola pemerintahan. Dynamic governance begitu dipercaya bisa menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan dynamic governance pula, Indonesia dinilai mampu bertahan dan beradaptasi dengan permasalahan yang muncul. Saat ini beberapa negara maju telah mulai mengadopsi dynamic governance. Singapura, disebut-sebut negara yang sukses mengadopsi dynamic governance. Singapura memiliki lima nilai yang mendasari dynamic governance, yaitu, nilai integritas sosial, nilai meritokrasi dalam sektor pembangunan, nilai rasional, menerapkan subsidi silang sebagai aplikasi untuk memenuhi nilai stabilitas sosial, dan harmonisasi dibutuhkan bagi warga Singapura yang multietnis.

Konsep dynamic governance sendiri dituliskan Prof. Neo Boon Siong Dynamic dari Nanyang Technological University (NTU) Singapore. Bersamanya ada tiga orang Indonesia yakni Prof. Azhar Kasim Guru Besar FISIP-UI, Prof. Dr. Martani Huseini pakar bidang Administrasi sekaligus Guru Besar UI, serta DR. Rozan Anwar Co-Founder Daya Dimensi Indonesia.

Menurut Neo Boon Siong, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah terkait dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik.

Sementara itu Martani Huseini



menilai Indonesia harus kembali mengejar ketertinggalan dari negara jiran terkait penerapan reformasi birokrasi. Padahal menurutnya, pada tahun 1970-an Indonesia memiliki kualitas setara dengan Singapura dan Korea Selatan terkait reformasi birokrasi. “Hiruk pikuk ini tergantung bagaimana internalitas itu dimanage tentang pola pikir. Good governance itu proses dan ini diinput untuk bisa menyikapi situasi dan dalam kancah ASEAN,” ujarnya. Dijelaskannya, landasan reformasi birokrasi harus mengedepankan pembenahan culture atau budaya.

Martani mencontohkan, revolusi mental yang diusung oleh pemerintahan Jokowi telah mengubah pola pikir agar lebih baik meski penerapannya belum optimal. “Governance itu harus yang pilih profesional. Kalau governance kita tak begitu. Sebetulnya dynamic governance adalah bagaimana kelola dalam hiruk pikuk,” sebutnya. Ditambahkannya, dalam konsep dynamic governance, dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur harus dikedepankan. Dua kunci ini diyakini bisa menggerakkan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif. “Cara menerapkan dynamic reform di Indonesia adalah melalui kepemimpinan transformatif yang menjadi kunci perubahan radikal, pemimpin visioner dan pemimpin transformasional untuk membangun ide,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Sarwono

Kusumaatmadja yang juga mantan Menteri di era Orde Baru mengatakan dibutuhkan seorang pemimpin tidak lazim untuk mengubah pemerintahan Indonesia untuk menuju Dynamic Governance. “Indonesia hanya bisa maju karena adanya orang tidak lazim,” cetusnya.



Senada dengan Martani, Sarwono menekankan, dynamic governance butuh dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur. “Dua kunci penting inilah yang akan menggerakkan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif atau yang dicita-citakan sebagai Dynamic Governance,” tandasnya. Sarwono memaparkan, banyak prestasi yang telah diraih oleh pemerintah namun belum banyak tersampaikan ke masyarakat. “Prestasi semacam ini seharusnya lebih banyak dimunculkan ke hadapan publik sehingga dapat menjadi pemicu perbaikan berikutnya,” imbuhnya.

Adapun Direktur Program

Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, menyatakan terdapat tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yaitu perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Ditegaskannya, pemerintahan adaptif ialah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. “Yang

pasti, pemerintah daerah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan,” ucapnya.

Pemerintah sendiri meyakini dengan mewujudkan dynamic governance, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju. Dengan memperoleh kepuasan publik, pemerintah akan mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat yang akan membuahkan dukungan dan berujung pada kestabilan negara. Kondisi yang stabil berpotensi strategis dalam membangun negeri yang bernilai jual tinggi di tingkat dunia. **PS/ dbb**



KERIPIK, JADI JALAN LEBIH SEJAHTERA

Gurihnya keripik bisa dijadikan usaha yang memberikan keuntungan seguh rasanya. Selain diminati konsumen, pasarannya juga bagus sehingga mendatangkan keuntungan yang menggiurkan.

Keripik, siapa sih yang tak kenal cemilan satu ini. Keripik atau kripik adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Tak jarang untuk mendapatkan rasa yang lebih gurih

dan renyah diberi bumbu rempah tertentu. Makanan kering ini laris manis dan pelengkap suasana santai di rumah ataupun di kantor.

Larisnya cemilan keripik tak pelak membuka peluang yang besar untuk menekuni usaha ini. Salah satu yang merasakan gurihnya berbisnis keripik ini yakni

Rini Sumiarsih, warga desa Mayak, kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat.

Awalnya, Rini mencoba menjajal peruntungan di dunia bisnis keripik yang berbahankan talas dengan niat membantu keuangan keluarga. Pilihan pada usaha keripik talas didasari karena melimpahnya bahan baku Talas di desanya. Talas biasanya hanya direbus lalu dimakan untuk jajanan teman minum kopi atau teh di waktu pagi atau sore hari, belum ada orang yang mencoba membuat keripik dari bahan Talas. Butuh waktu yang tidak sebentar dalam memperoleh rasa keripik yang pas. Maklum saja, ia baru pertama kali mencoba bisnis keripik talas. Produk keripik talasnya diberikan cuma-cuma untuk para tetangganya sebagai tes pasar. Keripik talasnya belum dimodifikasi apa-apa, rasanya pun hanya satu yaitu asin.

Percobaan terus dilakukan hingga akhirnya Rini bersama suami memberanikan diri untuk menjual hasil karyanya. Produknya dipasarkannya lewat warung-warung kecil di wilayah Cibeber. Keripik talas yang dititipkan ternyata disambut positif warga Cibeber.

Keripik talas buatan Rini semakin hari semakin banyak yang beli. Untuk lebih memperkenalkan produknya, ia memutuskan memutuskan untuk memberi label pada produknya. Proses pemilihan untuk labelnya itu pun tak mudah. Mereka terus berpikir nama apa yang cocok untuk produk mereka. Akhirnya dipilihlah nama “lebay” yang diambil dari nama julukan Rini di lingkungan ibu-ibu PKK di desanya.

Saat ini, produk Keripik Lebay memiliki rasa berbeda-beda seperti rasa balado, keju dan original. Pemasarannya pun semakin

luas dengan pangsa pasarnya mencapai 135 toko. Dengan semakin berkembangnya usaha dan minat masyarakat terhadap keripik buatannya, Rini berharap keripik Lebay jadi icon Cianjur

ANEKA KERIPIK

Nasib serupa juga dialami Suparji, pengusaha keripik di Kedaung, Kemiling Lampung. Dari usaha keripik ternyata bisa menambah pundi pundi keuangannya. Hasil usahanya bisa untuk menopang biaya kebutuhan rumah tangga sehari hari dan ditabung untuk persiapan masa depan.

Menekenuni usaha keripik bukan pekerjaan baru bagi Suparji. Sejak 13 tahun yang lalu alumnus Universitas Muhammadiyah Lampung ini sudah mulai mengembangkan usaha keripiknya. Saat ini usaha keripiknya sudah terbilang maju, lewat bendera CV Anugrah Jaya Mandiri ini. Produk keripiknya sudah tersebar di outlet-outlet koperasi beberapa perusahaan swasta dan koperasi BUMN di wilayah Provinsi Lampung. Pemasaran juga sudah banyak di kios dan toko aneka oleh oleh yang ada di Tulang Bawang.

Untuk memasarkan produknya, Suparji terjun langsung dalam menjajakan produk keripiknya.



Pengalaman manis, pahit dan getir dalam menjalankan usaha makanan ringan ini sering kali dialami. Aneka keripik yang di produksinya antara lain keripik tepung bawang bombay, keripik singkong, keripik nangka, keripik pisang,

Kapasitas produksi usahanya sudah lumayan besar. Dalam sehari tak kurang dari 75 kg keripik siap di pasarkan.

Untuk mendapatkan bahan baku seperti singkong dan pisang, Suparji langsung membelinya dari petani di daerah Kemiling.

Ada pula yang didatangkan dari Kalianda, Lampung Selatan. Namun diakuinya, terkadang agak sulit untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Jika singkong dan pisang sulit didapat biasanya produksi keripiknya dibuat dari olahan bahan tepung terigu.

Kini, kesuksesan Suparji tidak hanya mendatangkan keuntungan saja. Sebagai pengusaha kecil mandiri yang dinilai sudah cukup berhasil, dirinya juga membina beberapa pengusaha kecil lainnya.

(yn/dbs)



MANDIRI ENERGI BERKAT SAMPAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam mengembangkan sampah menjadi gas metan membuat warga sekitar TPAS bisa mandiri energi

Kebutuhan akan gas dan listrik yang dikeluhkan karena sebagian masyarakat karena harganya melambung tak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Puwatu, Kendari. Masyarakat di sini tak perlu lagi berkeluhkesah saat gas mengalami kelangkaan ataupun tariff listrik naik. Sebab di kampung ini semuanya sudah dapat diperoleh secara mandiri.

Kampung mandiri energi merupakan program inovasi andalan pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Di pemukiman ini penerangan dan kompornya menggunakan gas metan. Gas metan ini dihasilkan dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Puuwatu.

Sejak tahun 2013, pemerintah memulai membangun sebuah kawasan yang bernama kampung mandiri energi. Terdapat sekitar 200 unit rumah untuk para pemulung yang tinggal di sekitar TPA Puwatu. Selain dihuni para pemulung, kompleks ini diperuntukkan bagi para petugas pengangkut sampah dinas kebersihan kota kendari (pasukan kuning) yang belum memiliki rumah sendiri. Di setiap rumah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang didukung dengan penggunaan gas metan, seperti kompor dan genset yang menggunakan gas metan.

Tercetusnya program membuat kampung mandiri energi berawal dari upaya dinas kebersihan yang

sukses memanfaatkan gas metan yang terdapat dalam tumpukan sampah di TPA Puwatu. Dinas kebersihan kemudian mencoba membagi hasil gas metan itu pada masyarakat, namun sayang pemukiman warga sangat jauh dari TPA. Dinas Kebersihan Kota Kendari bersama Dinas Sosial, Tata Kota dan Perumahan dan Dinas Kebersihan lantas membangun kampung mandiri energi tersebut.

Ide mengembangkan TPAS Puuwatu cukup sederhana yakni mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah dari barang yang jorok menjadi sesuatu produk yang bermanfaat. Pada sisi lain, pertumbuhan kota Kendari



cukup pesat lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini melahirkan sejumlah masalah, salah satunya degradasi lingkungan yang disebabkan persoalan sampah.

Program ini mulai dirintis sejak tahun 2008, saat pemerintah Kota Kendari melalui kolaborasi dinas kebersihan dan badan lingkungan hidup kota kendari melakukan kajian memanfaatkan potensi gas metan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah melalui teknik pemasangan ventilasi gas secara sederhana.

Setelah beberapa kali studi banding dan peningkatan kapasitas aparat dinas kebersihan yang difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum, tahun 2011 dimulailah uji coba pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi terbarukan. Hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan khusus di TPAS seperti sumber listrik alternatif dan bahan bakar rumah tangga.

Baru pada tahun 2013, Dinas Kebersihan mendapat alokasi dana Rp 150 juta untuk menambah kapasitas mesin pembangkit listrik dan pemasangan instalasi perpipaan untuk kebutuhan warga di kampung mandiri energi yang lokasinya tidak jauh dari kawasan TPAS.

Selama ini persoalan sampah yang membuat wajah ibu kota Sultra ini tidak bersih dan tidak hijau. Beragam aksi pemanfaatan sumber daya energi yang efisien dan ramah lingkungan coba dilakukan. Di antaranya, membuat wisata pengelolaan gas metan tempat pembuangan akhir (TPA) dan kampung mandiri energi Puuwatu. Selain itu, Pemkot Kendari meluncurkan mobil berbahan bakar sampah. Dan, satu lagi terobosan yang ada yakni membuka wisata di tempat pembuangan sementara (TPS) energi komunal Paddys Market (sentra PKL Jalan Lawata, Puuwatu).

Untuk menghasilkan gas metan,

ditempat ini belum menggunakan teknologi tinggi, tetapi cukup dengan teknologi sederhana. Proses penangkapan gas metan dari dalam tumpukan sampah melalui pipa penyalur hingga mengeluarkan gas ke permukaan yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat. Pipa penyalur tersebut ditancapkan dengan kedalaman tertentu. Setelah tertancap, gas yang terambil itu mengalir ke sistem pemisah gas di pipa terminal utama.

Saat ini, pemanfaatan sampah di TPAS Puuwatu menjadi gas metan masih terbatas, karena belum bisa



dimanfaatkan masyarakat secara luas, tetapi itu akan menjadi tujuan jangka panjang. Selain untuk kebutuhan kompor gas, gas metan ini juga sebagai bahan bakar genset untuk penerangan sekitar TPAS Puuwatu ini.

Pengelolaan gas dari TPAS merupakan salah satu langkah untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan akibat penumpukan gas rumah kaca. Hampir 50% gas yang ditimbulkan akibat degradasi sampah secara anaerob adalah gas metana. Selain dengan cara dibakar, penghancuran gas metana dapat pula dilakukan dengan pembangkit listrik berbahan bakar gas metana.

TEMPAT WISATA

Selain memanfaatkan sampah menjadi gas metan, TPAS Puuwatu juga dikembangkan menjadi tempat wisata. Ini sekaligus merubah paradigma orang yang selama

mengatakan bahwa tempat sampah itu identik dengan bau busuk dan kotor.

Maklum, saat mendengar tentang Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang terlintas di benak kita suatu kawasan yang jorok, bau, kumuh dan kesan tidak ingin berlama-lama di area tersebut. Kesan ini akan sirna saat masuk ke TPAS Puuwatu sebab tak terlihat pemandangan gunung sampah. Bahkan bau busuk menyengat pun tak tercium di TPA seluas 18 hektare. Lokasinya tertata rapi, hijau, dan sejuk. Wilayah berbukit dibagi beberapa kluster.

Gundukan sampah berdimensi sekitar 10 x 20 meter tertutup lapisan membran menyerupai terpal.

Di beberapa titik kubangan berdiri belasan pucuk pipa paralon berdiameter 15 sentimeter tersebar. Pada bagian pangkal bawah tersambung paralon berdiameter 5 sentimeter.

Arahnya memanjang seperti pipa air PDAM. Sebagian tampak di atas permukaan tanah dan

sebagian lagi terpendam. Arahnya ke 136 rumah-rumah di kampung mandiri energi dan sebagian ke showroom pantau TPA wisata Bougenville di puncak bukit Puuwatu. Ratusan rumah sengaja didirikan di kampung mandiri energi itu. Rumah petak disediakan untuk pemulung yang tinggal di seputar TPA Puuwatu.

Kesan kagum biasanya terungkap dari setiap pengunjung usai menjau kampung mandiri energi dan wisata TPAS ini. Inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam mengembangkan sampah menjadi gas metan untuk pengganti bahan bakar minyak tidak hanya memberikan manfaat bagi kebutuhan warga. Namun, manfaat bagi kelestarian lingkungan juga sangat besar. Kini, masyarakat tak lagi merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah di TPAS Puuwatu namun justru dijadikan sarana edukasi dan wisata. (yn/db)

KAA PERTAMA KALI di BULAN APRIL



- **12 April** resmi ditetapkan sebagai “Hari Bawa Bekal Nasional” oleh Kemkes RI, Kemdikbud, dan Badan POM RI. Kampanye yang muncul sejak 12 April 2013 ini merupakan suatu upaya edukatif dan komunikatif menyikapi aneka jajanan siswa sekolah yang diketahui mengandung banyak bahan tambahan berbahaya. Tujuannya, agar setiap anak membawa bekal makanan yang bersih, sehat, dan bergizi ke sekolah. Edukasi untuk membawa bekal yang bersih dan sehat ini berguna untuk mencegah anak-anak jajan sembarangan serta dapat menstimulasi otak anak sehingga menjadi “Anak Jempolan” dan meraih masa depan yang gemilang.
- **18 April** rutin dilakukan peringatan Hari Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT AA). Konferensi ini juga dikenal dengan nama ‘Konferensi Bandung.’ Negara peserta konferensi adalah negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau nekolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut *Dasasila Bandung*, yang berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kerusuhan dan kerjasama dunia.” *Dasasila Bandung* ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961.

Konferensi penting dalam sejarah diplomasi Indonesia ini, jika dikilas balik, sudah diinisiasi jauh hari sebelumnya:

- 23 Agustus 1953 - Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan

Afrika dalam perdamaian dunia.

- 25 April–2 Mei 1954 - Berlangsung Persidangan Kolombo di Sri Lanka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma (sekarang Myanmar), dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia memberikan usulan perlunya adanya Konferensi Asia-Afrika.
- 28–29 Desember 1954 - Untuk mematangkan gagasan masalah Persidangan Asia-Afrika, diadakan Persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan, serta siapa saja yang akan diundang.
- 18–24 April 1955 - Konferensi Asia-Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo.
- **19 April** adalah Hari Hansip Nasional. Organisasi **Pertahanan Sipil** biasa disingkat **Hansip** adalah salah satu satuan pertahanan dan keamanan yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia. Berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1972 bahwa Organisasi Pertahanan Sipil dalam sistim Hankamrata merupakan komponen Hankam dan komplemen ABRI. Organisasi Hansip dibubarkan pada 2014 oleh Presiden S.B Yudhoyono

melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2014. Hansip juga dikenal dengan sebutan Linmas.

- **20 April** sejak tahun 2012 diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah lalu menerbitkan Keputusan Presiden No 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Tanggal 20 April dipilih mengingat tanggal tersebut merupakan tanggal penetapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Selain untuk meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, peringatan Hari Konsumen Nasional juga diharapkan akan menempatkan konsumen sebagai subyek penentu kegiatan ekonomi dan menjadi konsumen cerdas yang cinta produk dalam negeri, sehingga memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global.
- **21 April** diperingati sebagai Hari Kartini. **Raden Adjeng Kartini** (lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 – meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 pada umur 25 tahun) **Raden Ayu Kartini** adalah seorang tokoh suku Jawa dan Pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

INI FAKTANYA!

- Negara Indonesia adalah penghasil 400 jenis tanaman buah, 370 tanaman sayur, 70 tanaman berumbi, dan 55 jenis rempah-rempah.
- Ada sekitar 1 quadrillion (1,000,000,000,000,000) semut di seluruh dunia.
- Penulis lagu ulang tahun 'Happy Birthday To You' adalah wanita Amerika dengan nama Mildred Hill pada tahun 1890.
- Mata akan tampak turun ketika sedih, terbuka lebar ketika takut, terlihat tidak fokus ketika sedang berkhayal.
- Pulau Simping di Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan pulau terkecil di dunia dan telah diakui oleh PBB.
- Meletakkan pemancar Wifi di dekat microwave, akan memperlambat kecepatan internet.
- Tahukah Anda, di Danau Sentani, Papua, terdapat hiu satu-satunya yang hidup di air tawar yaitu Hiu Kepala Gergaji.
- Tahukah Anda, letusan supervolcano toba 75 ribu tahun yang lalu mengakibatkan turunnya suhu bumi selama 1000 tahun.
- FBI didirikan pada tahun 1908 oleh Charles Bonaparte, yang juga adalah cucu dari adik Napoleon Bonaparte bernama Jerome Bonaparte.
- Kenapa cincin di jari manis? Org Romawi kuno percaya jari manis kiri dihubungkan langsung dengan jantung oleh pembuluh 'vena amoris.'

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.” – Soekarno.

EVENT & FOTO

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menghadiri Hari Perempuan Internasional di Theater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini juga dihadiri Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden Perempuan Pertama di Indonesia dan sejumlah menteri perempuan dalam Kabinet Kerja seperti Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.



Menko PMK Puan Maharani menunjukan tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahunan didampingi Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Rida Handanu (kiri) dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Suwarno (kanan) di Aula Kemenko PMK, Jakarta.





Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sugihartatmo memimpin rapat terkait Revolusi Mental di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Selain dihadiri oleh jajaran Kemenko PMK, rapat Revolusi Mental juga diikuti oleh para akademisi, pakar serta tokoh masyarakat.



Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei (tengah), memberikan arahan pembuka pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ekspedisi NKRI Tahun 2015, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.



Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BBPD Seluruh Indonesia di Jakarta.



Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono memimpin rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi umat pondok pesantren dalam rangka mendukung Sail Tomini 2015.



Menko PMK Puan Maharani bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyempatkan diri meninjau stand yang ada di Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.



Menko PMK Puan Maharani membubuhkan tanda tangan dalam acara Deklarasi Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Sultan, Jakarta.



‘Raih Ilmu Bersama Buku,
untuk Masa Depan yang
Lebih Baik’

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Buku adalah Jendela Dunia
Menyambut Hari Buku 23 April 2015

